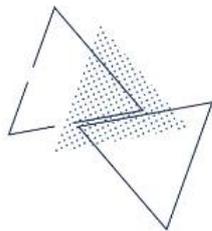


LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2023





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang 33684

Telepon : (0717) 439439

Laman : babel.kemenkumham.go.id Surel : kanwilbabel@kemenkumham.go.id

Nomor : W.7-PR.04.04-448

15 Januari 2024

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Surat Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

di tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002

Tembusan:

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

LKjIP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, kedua merupakan sarana evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, LKjIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana

kinerja dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran, akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti rencana serta peluang yang ada untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya laporan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini, pimpinan dan seluruh pegawai bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada segenap jajaran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, 15 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

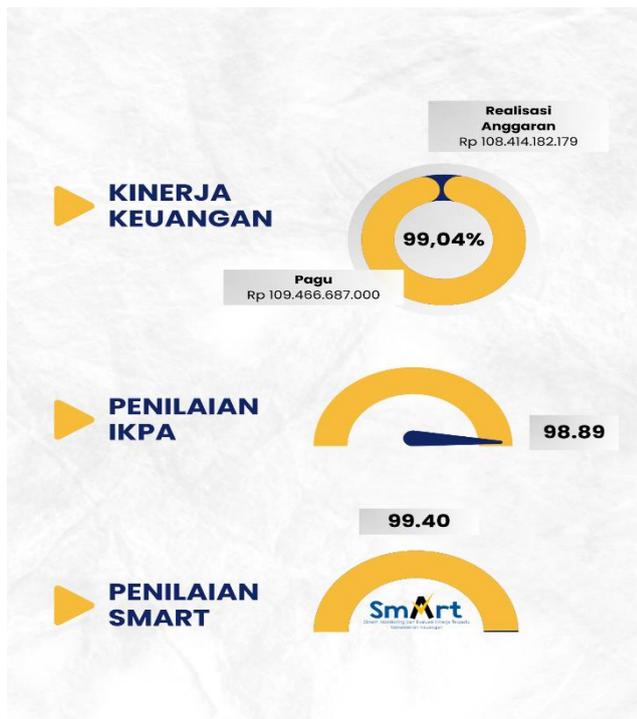
NIP 196504081987031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Penyerapan tersebut akan terus bertambah seiring dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu **Profesional, Akuntabel,**

Sinergis, Transparan dan Inovatif. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada 9 Program dengan menggunakan 22 Sasaran Kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 60 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung **telah tercapai target sebanyak 44 Indikator Kinerja.** Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebesar **99,21.**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	19
D. ASPEK STRATEGIS	19
E. ISU STRATEGIS.....	20
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN	205
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	206
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	209
E. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA	215
BAB IV PENUTUP	217
1. KESIMPULAN	217
2. SARAN DAN REKOMENDASI	220
LAMPIRAN	222



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai di Lingkungan	18
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023	38
Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Survey Inregritas	43
Tabel 3.3 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK I	45
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK I	45
Tabel 3.5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK I	45
Tabel 3.6 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK II dan IKK I	48
Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK III dan IKK I	49
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK I	51
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK I	51
Tabel 3.10 Target Jangka Menengah SK III dan IKK I	52
Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II	53
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK II	54
Tabel 3.13 Target Jangka Menengah SK III dan IKK II	54
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK III	56
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK III	56
Tabel 3.16 Target Jangka Menengah SK III dan IKK III	57
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK I	58
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK I	59
Tabel 3.19 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK I	60
Tabel 3.20 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	61
Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK II	61
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK II	62
Tabel 3.23 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK II	62
Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK III	64
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK III	65
Tabel 3.26 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK III	65
Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK IV	67
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK IV	67



Tabel 3.29 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK IV	68
Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK V	69
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK V	70
Tabel 3.32 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK V	70
Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK VI	72
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK VI	72
Tabel 3.35 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK VI	73
Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK VII	74
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK VII	75
Tabel 3.38 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK VII	75
Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK I.....	77
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK SK V dan IKK I	77
Tabel 3.41 Target Jangka Menengah IKK SK V dan IKK I.....	78
Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK II.....	79
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK II.....	80
Tabel 3.44 Target Jangka Menengah SK V dan IKK II.....	80
Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK I.....	82
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK I.....	83
Tabel 3.47 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK I.....	83
Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK II.....	85
Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK II.....	85
Tabel 3.50 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK II.....	86
Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK III.....	87
Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK III.....	87
Tabel 3.53 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK III.....	88
Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK I.....	89
Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK I.....	90
Tabel 3.56 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK I.....	91
Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK II.....	92
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK II.....	93
Tabel 3.59 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK II.....	93
Tabel 3.60 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK III.....	94



Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK III.....	95
Tabel 3.62 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK III.....	95
Tabel 3.63 Perbandingan Target dan Realisasi IKK SK VII dan IKK IV.....	97
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK IV	97
Tabel 3.65 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK IV	98
Tabel 3.66 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK I.....	99
Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK I.....	100
Tabel 3.68 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK I.....	100
Tabel 3.69 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK II.....	102
Tabel 3.70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK II.....	102
Tabel 3.71 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK II.....	103
Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK III.....	104
Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK III.....	104
Tabel 3.74 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK III.....	105
Tabel 3.75 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK IV	106
Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK IV	107
Tabel 3.77 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK IV	107
Tabel 3.78 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK I.....	108
Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK I.....	109
Tabel 3.80 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK I.....	110
Tabel 3.81 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK II.....	111
Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK II.....	111
Tabel 3.83 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK II.....	112
Tabel 3.84 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK III.....	113
Tabel 3.85 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK III.....	114
Tabel 3.86 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK III.....	114
Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK IV	115
Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK IV	116
Tabel 3.89 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK IV	116
Tabel 3.90 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK I.....	119
Tabel 3.91 Target Jangka Menengah SK X dan IKK I.....	119
Tabel 3.92 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK II.....	121



Tabel 3.93 Target Jangka Menengah SK X dan IKK II.....	122
Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK III.....	123
Tabel 3.95 Target Jangka Menengah SK X dan IKK III.....	124
Tabel 3.96 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK IV	126
Tabel 3.97 Target Jangka Menengah SK X dan IKK IV	127
Tabel 3.98 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK V	128
Tabel 3.99 Target Jangka Menengah SK X dan IKK V	129
Tabel 3.100 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VI	130
Tabel 3.101 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VI	131
Tabel 3.102 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VII	133
Tabel 3.103 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VII	134
Tabel 3.104 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VIII	136
Tabel 3.105 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VIII	137
Tabel 3.106 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	139
Tabel 3.107 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK I.....	140
Tabel 3.108 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XI dan IKK I.....	140
Tabel 3.109 Target Jangka Menengah SK XI dan IKK I.....	141
Tabel 3.110 Nilai IPK Kanwil Bangka Belitung Unsur Survei Pihak Internal.....	143
Tabel 3.111 Nilai IPK Kanwil Bangka Belitung Unsur Survei Pihak Eksternal	143
Tabel 3.112 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK II.....	144
Tabel 3.113 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK II.....	145
Tabel 3.114 Target Jangka Menengah SK XI dan IKK II.....	145
Tabel 3.115 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK I.....	148
Tabel 3.116 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XII dan IKK I.....	148
Tabel 3.117 Target Jangka Menengah SK XII dan IKK I.....	149
Tabel 3.118 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIII dan IKK I.....	151
Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK I.....	151
Tabel 3.120 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK I.....	152
Tabel 3.121 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK I	154
Tabel 3.122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK I	154
Tabel 3.123 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK I	155
Tabel 3.124 Perbandingan Target dan Realisasi IKK SK XIV dan IKK II.....	157



Tabel 3.125 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK II	157
Tabel 3.126 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK II	158
Tabel 3.127 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK I	160
Tabel 3.128 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK I	160
Tabel 3.129 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK I	161
Tabel 3.130 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK II	162
Tabel 3.131 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK II	163
Tabel 3.132 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK II	163
Tabel 3.133 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK III	165
Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK III	165
Tabel 3.135 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK III	166
Tabel 3.136 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK I	168
Tabel 3.137 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK I	168
Tabel 3.138 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK I	169
Tabel 3.139 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK II	170
Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK II	171
Tabel 3.141 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK II	171
Tabel 3.142 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVII dan IKK I	173
Tabel 3.143 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVII dan IKK I	174
Tabel 3.144 Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK I	174
Tabel 3.145 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVIII dan IKK I	176
Tabel 3.146 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XVIII dan IKK I	176
Tabel 3.147 Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK I	177
Tabel 3.148 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIX dan IKK I	179
Tabel 3.149 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK I	180
Tabel 3.150 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK I	180
Tabel 3.151 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK I	182
Tabel 3.152 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK I	183
Tabel 3.153 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK I	183
Tabel 3.154 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK II	185
Tabel 3.155 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK II	186
Tabel 3.156 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK II	186



Tabel 3.157 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK III	188
Tabel 3.158 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XX dan IKK III	188
Tabel 3.159 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK III	189
Tabel 3.160 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK IV	190
Tabel 3.161 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK IV	191
Tabel 3.162 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK IV	191
Tabel 3.163 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK V	193
Tabel 3.164 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK V	193
Tabel 3.165 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK V	194
Tabel 3.166 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK I	196
Tabel 3.167 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK I	196
Tabel 3.168 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK I	197
Tabel 3.169 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK II	198
Tabel 3.170 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XXI dan IKK II	198
Tabel 3.171 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK II	199
Tabel 3.172 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK III	200
Tabel 3.173 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK III	201
Tabel 3.174 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK III	201
Tabel 3.175 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXII dan IKK III	203
Tabel 3.176 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXII dan IKK III	203
Tabel 3.177 Target Jangka Menengah SK XXII dan IKK III	204
Tabel 3.178 Pagu dan Realisasi Anggaran	205
Tabel 3.179 Nilai SMART DJA	206
Tabel 3.180 Nilai IKPA	208
Tabel 3.181 Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2023	210
Tabel 3.182 Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2023	211
Tabel 3.183 Capaian Target Kinerja Divisi Masyarakat Tahun 2023	212
Tabel 3.184 Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2023	213
Tabel 3.185 Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022 dan 2023	213
Tabel 3.186 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Tahun 2023	214



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Unit Pelaksana Teknis	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah	17



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan *isu* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudannya yaitu pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan transparansi dalam setiap kegiatan. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *umum pemerintahan yang baik*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip tersebut merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, terwujud dalam suatu laporan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan laporan akuntabilitas pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua instrumen hukum tersebut, menjadi pedoman dan acuan dari seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunannya dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang - Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian antara lain :

1. Lembaga Masyarakat Kelas II Pangkalpinang;
2. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II Pangkalpinang;



3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;
10. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
11. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan.

Gambar 1. 1 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Babel



Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor



Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Humas
- 2) Bagian Umum

II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja



- produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
 - d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan terdiri dari :

- 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
- 2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



Divisi Keimigrasian terdiri dari :

- 1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
- 2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan



- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Bidang Pelayanan Hukum
- 2) Bidang Hukum
- 3) Bidang Hak Asasi Manusia

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Pada Tahun 2023, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 752 orang sebagai berikut :

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 5 orang
2. Pejabat Administrator : 16 orang
3. Pejabat Pengawas : 52 orang
4. Pejabat Pelaksana : 63 orang
5. Pejabat Fungsional Tertentu : 177 orang
6. Pejabat Fungsional Umum : 439 orang

Tabel 1. 1 Keadaan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

NO	SATUAN KERJA	TAHUN							
		2022				2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Kantor Wilayah	0	7	91	19	0	6	92	21
2	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	0	32	45	2	0	29	50	1
3	Lapas Kelas II Narkotika Pangkalpinang	0	45	32	1	0	43	34	1
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	0	11	48	2	0	12	44	2
5	Lapas Klas IIB Tanjungpandan	0	24	23	0	0	39	25	1
6	Lapas Klas IIB Sungailiat	0	31	41	1	0	27	46	1
7	Kantor Imigrasi Klas II Tanjungpandan	0	8	28	1	0	9	29	1
8	LPKA Kelas II Pangkalpinang	0	44	17	1	0	43	17	0
9	Rumah Tahanan Negara Muntok	0	19	26	1	0	19	28	0
10	BAPAS Kelas II Pangkalpinang	0	1	39	0	0	1	44	0
11	RUPBASAN Kelas II Pangkalpinang	0	3	15	1	0	3	16	0
12	LPP Kelas III Pangkalpinang	0	47	7	1	0	59	8	1
13	CPNS	0	34	4	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	306	416	30	0	290	433	29
	TOTAL	752				752			



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan dan pengembangan hukum dan HAM nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Provinsi Kepulauan Bangka memiliki 1 kota dan 6 kabupaten yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Ibu kota provinsi ini ialah Kota Pangkalpinang.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengampu 11 satuan kerja terdiri dari 9 satuan kerja Pemasyarakatan meliputi 6 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Rutan, 1 Balai Pemasyarakatan, 1 Rupbasan, serta 2 satuan kerja Keimigrasian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam lingkup lebih kecil yaitu lingkup Provinsi. Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dalam rangka Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, Pelayanan bidang pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan, Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta pengaduan dalam komunikasi masyarakat terkait HAM.

E. ISU STRATEGIS

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Upaya untuk mencapai Kinerja Pemerintahan yang baik telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek kinerja yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.



Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketidakseragaman pemahaman manajemen kerja pada masing-masing satker, beragamnya tingkat Pendidikan pegawai dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja sehingga berdampak pada capaian *output* kegiatan;
2. Terdapat satuan kerja yang belum mendapat predikat WBK/WBBM;
3. Terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya;
4. Masih terdapat BMN yang telah melewati masa pakai namun belum dilakukan penghapusan BMN;
5. Terdapat satuan kerja yang pelaksanaan realisasi anggarannya tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD);
6. Masih terdapat dokumen persuratan yang tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) belum mencapai target dikarenakan per bulan November tahun 2023 telah di lakukan Kegiatan ACF TBC Melalui Skrining Gejala dan Intervensi Chest X-ray (Mobile Rontgen) kepada 206.330 Tahanan/Narapidana/Anak di 374 UPT Pemasarakatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023. Sehingga terdeteksi jumlah narapidana lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang positif TB jadi untuk narapidana yang berhasil sembuh belum ada karena belum habis masa pengobatannya sampai dengan tahun 2023;
8. Adanya masalah pengelolaan barang rampasan ini belum memberikan manfaat optimal kepada negara dan ada kecenderungan barang rampasan tidak terawat, terbengkalai sehingga nilainya semakin lama semakin turun;
9. Adanya keterbatasan sarana pendukung dan anggaran pemeliharaan pada barang rampasan yang jumlahnya relatif banyak;
10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan per bulan Juni tahun 2023 untuk program asimilasi



- rumah telah ditiadakan sehingga mengurangi data dalam perbandingan penghitungan bagi narapidana yang termasuk dalam syarat hak-hak integrasi;
11. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa Lapas yang belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan Kejar Paket A, B, dan C;
 12. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikasi belum mencapai target dikarenakan keterbatasannya tenaga pengajar yang bekerja sama dengan pihak Lapas/Rutan/Anak, sehingga kurangnya minat WBP untuk melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang bersertifikat;
 13. Bagaimana membuat inovasi layanan yang mendorong masyarakat untuk membuat paspor sehingga memberikan dampak positif penerimaan PNPB bagi negara;
 14. Bagaimana meningkatkan peran imigrasi dalam peningkatan investasi asing di Bangka Belitung;
 15. Sistem jaringan yang sering eror;
 16. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah;
 17. Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing;
 18. Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum terlalu efektif dalam pembinaannya disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM yang ada di Pemerintah Daerah;
 19. Masih terdapat Pemerintah Daerah yang tidak menganggarkan pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan binaan;
 20. Sebaran OBH yang masih belum merata di setiap Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 21. Belum tersedianya kuesioner pemberian layanan bantuan hukum pada aplikasi Sidbankum (Sistem Informasi Bantuan Hukum);
 22. Belum meratanya standar layanan bantuan hukum pada setiap OBH yang terakreditasi;
 23. Masih terdapat OBH yang melakukan penyimpangan terkait pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat;



24. Kabupaten/Kota belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan Propemperda/Prolegda dan bagaimana pelaksanaannya penyusunannya;
25. Pelaksanaan Propemperda di setiap daerah masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani;
26. Sarana dan prasarana seperti ruang rapat untuk harmonisasi dan penyusunan Naskah Akademik tidak tersedia secara permanen;
27. Masih ada beberapa DPRD Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengharmonisan ke Kantor Wilayah yang disebabkan kurangnya kerja sama dan sinergitas;
28. Belum maksimalnya pelaksanaan di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari Tim Pokja, mengingat keadaan ini baru dilaksanakan pada tahun 2020;
29. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari berbagai instansi/*stakeholder* terkait, namun tidak berjalan sebagaimana semestinya;
30. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
31. Koordinasi Instansi terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung masih kurang;
32. Otomasi belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran;
33. Ruang JDIH belum representatif (terbuka), sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal;
34. Belum maksimalnya pengelolaan *website*, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi;
35. Kurangnya akses layanan administrasi hukum umum pada kantor Wilayah karena saat ini akses layanan terpusat di Ditjen AHU;
36. Belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris pada semua Kabupaten yang ada di Bangka Belitung, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengawasan oleh MPDN terhadap pelaksanaan tugas jabatan serta kode etik Notaris;
37. Belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka



- Belitung, hal tersebut disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya Kekayaan Intelektual terhadap sebuah produk;
38. Kecilnya minat UMKM untuk memahami kekayaan intelektual sehingga peserta yang mengikuti diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak variatif;
 39. Tidak terjangkaunya pelaku UMKM di daerah terpencil sehingga diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak tersampaikan secara maksimal kepada seluruh UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 40. Kurangnya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun;
 41. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran kekayaan intelektual;
 42. Minimnya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah;
 43. Kurangnya anggaran dari MPIG untuk melakukan tahap-tahap pengujian Indikasi Geografis;
 44. Masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam inventarisasi terhadap keanekaragaman hasil alam yang menjadi potensi indikasi geografis;
 45. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang Aksi HAM dan KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD;
 46. Masing-masing OPD terkait belum mempunyai program Aksi HAM;
 47. Pada saat terjadi mutasi tugas, Pemda sering berganti jabatan dan lemahnya pemahaman atas program Aksi HAM sehingga menyebabkan program Aksi HAM tidak dilaksanakan secara optimal;
 48. Program kerja monev aksi HAM tidak berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun awal tahun;
 49. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan dalam mengimplementasi aksi HAM;
 50. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD;
 51. Perubahan kriteria penilaian KKP HAM yang lebih rumit daripada tahun sebelumnya;
 52. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan dalam



mengimplementasi aksi HAM;

53. Belum semua UPT memahami kriteria pelayanan publik berbasis HAM;
54. Dukungan anggaran perlu diperhatikan, mengingat tidak adanya anggaran khusus pada UPT dalam mendukung P5HAM terutama pemenuhan sarana dan prasarana terkait P2HAM;
55. Pembinaan lembaga publik berbasis HAM di tingkat Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut terutama kriteria yang harus dipenuhi oleh UPTD;
56. Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung;
57. Ada beberapa pengaduan yang masuk akan tetapi pada saat akan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaian para pihak yang berwenang tidak hadir;
58. Masih minimnya pengetahuan operator aplikasi SIMASHAM;
59. Belum adanya SDM dengan formasi jabatan analis kebijakan di Kanwil yang dapat mendukung proses pembuatan kebijakan yang lebih optimal sehingga rekomendasi yang dihasilkan bisa lebih berkualitas;
60. Kurangnya penyampaian dan pemanfaatan laporan hasil analisa kebijakan serta tidak semua rekomendasi yang diberikan kepada *stakeholder* atau Pimpinan UPT yang mendapat respon positif/ditindaklanjuti segera;
61. Anggaran Kajian sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang mengalami pemblokiran sehingga kegiatan tidak terlaksana maksimal;
62. Kurangnya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media berbagai platform untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi Hukum, HAM dan Pelayanan Publik maupun hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan lapooran kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF : Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan menjelaskan capaian kinerja anggaran serta capaian kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023; dan
- Penghargaan Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- 1) Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5) Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;



- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut:

Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;



- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan; dan
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif**. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
- b) Akuntabel adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c) Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan



hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;

- d) Transparan adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; dan
- e) Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain itu sejak 27 Juli 2022, Kementerian PAN-RB meluncurkan *core values* dan *employer branding* baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, BerAKHLAK dikenalkan sebagai *core values* ASN seluruh Indonesia dan #banggamelayanibangsa sebagai *employer branding* ASN.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti;



- b. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif; dan
- g. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap



Laporan Kinerja.

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
Divisi Administrasi			
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	Rp. 14.945.870.000
Divisi Pemasarakatan			
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 (Indeks)	Rp. 540.527.000



Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
	2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
	3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
	3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
	5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	60%
	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
	3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA Dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
	2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
	3. Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	90%
	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
	2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Peserta pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
	5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%
Divisi Keimigrasian		

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	Rp.1.320.128.000
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Rp. 2.330.716.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	21 Layanan	Rp. 1.330.618.000
	2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	
	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	
Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Rp. 279.214.000,-
	2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Rp. 209.570.000,-
		16 Orang	
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaantenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Rp. 144.967.000,-



peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah			
Meningkatnya Kesadaran Hukum serta terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	82%	Rp. 975.298.000,-
	2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	
	3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 (Indeks)	
	4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah	70%	
	5. Persentase Website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Rp.243.997.000
	2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2023.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan per indikator kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Divisi Administrasi					
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.84	123%
Divisi Pemasarakatan					
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)	90 (Indeks)	110 (Indeks)
3.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	93%	103%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	146%	162%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	96%	106%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	85%	121%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100,2%	102%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	73%	86%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	62%	72,9%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yag berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	61,5%	362%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	14%	45%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	240%	333%
5.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	94%	117%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	17%	21,25%
6.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemsarakatan Dan Pemenuhan Hak	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	60%	94%	156%



LKjIP TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	71%	129%
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	92%	262%
7.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA Dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	95%	105%
8.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
9.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
10.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Peserta pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	103%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	100%	106%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%



LKjIP TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	19%	23,75%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba	27%	72%	266%
Divisi Keimigrasian					
11.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	3,99	122%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	3,75	119%
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
12.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5,37%	107%
13.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%	116%
14.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	21 Layanan	111 Layanan	528%
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	8 Lokus	800%
15.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	3 Lokus	150%
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%



LKjIP TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

16.	Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	100%
17.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%
18.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaantenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	50 Orang	312%
19.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%
20.	Meningkatnya Kesadaran Hukum serta terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	82%	94%	114%
		2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	100%	125%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 (Indeks)	77,25 (Indeks)	101%
		4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah	70%	78%	111%
		5. Persentase Website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	89%	445%
21.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	200%
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	233%



LKjIP TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	4 Instansi	400%
22.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%



SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 Indeks.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Integritas melalui Aplikasi 3AS dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dapat diakses pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Survey Integritas yang dilakukan terhadap layanan Kantor Wilayah meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- a. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi;
- b. Integritas kerja terkait pengelolaan SDM;
- c. Integritas dan pelaksanaan anggaran; dan
- d. Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.

Adapun rekapitulasi hasil Survey Integritas terhadap layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah periode Januari - Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Hasil Survey Inregritas

BULAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SISTEM ANTI KORUPSI	INDEKS SDM	INDEKS ANGGARAN	INDEKS ATURAN DAN NORMA	NILAI TOTAL INDEKS
Januari	48	98.02	96.97	95.49	96.87	96.84
Februari	41	96.17	96.17	95.63	96.24	96.05
Maret	45	95.17	96.24	95.28	96.11	95.84
April	35	95.17	95.85	94.40	95	95.11



BULAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SISTEM ANTI KORUPSI	INDEKS SDM	INDEKS ANGGARAN	INDEKS ATURAN DAN NORMA	NILAI TOTAL INDEKS
Mei	98	95.99	96.40	95.41	95.92	95.93
Juni	156	97.05	97.10	96.53	96.93	96.90
Juli	66	95.38	96	94.44	95.83	95.41
Agustus	160	96.26	96.35	95.49	96.28	96.10
September	109	96.33	96.18	95.26	96.10	95.97
Oktober	99	96.34	96.58	95.45	96.21	96.15
November	64	97.25	97.54	96.94	97.27	97.25
Desember	61	96.37	96.72	96.11	96.72	96.48
Total		1155.5	1158.1	1146.43	1155.48	1154.03

Capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Januari sampai dengan Desember dihasilkan dari formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \left[\left(\frac{\text{Total Hasil Survei}}{\text{Periode Survei}} \right) : 25 \right]$$

$$Realisasi = \left[\left(\frac{1154,03}{12} \right) : 25 \right]$$

$$Realisasi = 3.85$$

Terdapat perbedaan skala perhitungan antara target pada Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja dengan hasil survei. Pada Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan skala 1-4, sedangkan pada hasil survei menggunakan skala 1-100. Untuk itu, Hasil Survei harus dibagi dengan angka 25 untuk menghasilkan nilai survey dengan skala 1-4.

$$Capaian = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \left(\frac{3.85}{3.1} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 124\%$$

Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.85 Indeks	124%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2022, terdapat peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan dari 122% menjadi 124%. Dapat diartikan bahwa kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung meningkat pada Tahun 2023.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.8 Indeks	122%	3.1 Indeks	3.85	124%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada target jangka menengah dalam Rencana Strategis, menggunakan penilaian dengan skala 10 sehingga untuk membandingkannya Realisasi yang ada perlu dikonversikan menjadi skala 10 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Indikator	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Skala 1-4)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Skala 1-10)	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024			
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	7,2	7,21	7,22	7,23	3.85	9.62	124%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 telah melebihi



target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dikarenakan telah dilakukan beberapa langkah-langkah percepatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi serta pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Meningkatkan peran aktif Tim Unit Pemberantasan Gratifikasi dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap hal-hal yang mengindikasikan tindakan gratifikasi;
- c. Melakukan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan setiap apel pagi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- e. Menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai yang merasa tidak puas terhadap pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian yang diterima; dan
- f. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Survei Integritas Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut:



- a. Belum optimalnya peran pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- b. Belum maksimalnya Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah dikarenakan jumlah responden yang mengisi survei tidak sebanding dengan banyaknya pegawai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka, maka telah dilakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas; dan
- b. Melakukan ajakan mengisi Survei Integritas Pegawai secara massif, sehingga jumlah responden yang mengisi survey meningkat setiap periodenya.

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah diperoleh melalui hasil survei di Satuan Kerja lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Perhitungan realisasi indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \left[\left(\frac{\text{Total Hasil Survei}}{9} \right) \times 100\% \right]$$

$$\text{Realisasi} = \left[\left(\frac{810}{9} \right) \times 100\% \right]$$



$$Realisasi = \left[\left(\frac{810}{9} \right) \times 100\% \right]$$

$$Realisasi = 90$$

Berdasarkan perhitungan realisasi indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{90}{82} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 110\%$$

Tabel 3. 6 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK II dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	90 Indeks	110 Indeks

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil indeks penyelenggaraan di wilayah dengan realisasi 90 indeks dari target 82 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 110 indeks. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah telah melampaui target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah tidak dapat dianalisis perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 tidak terdapat indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk indikator indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah tahun 2023 sebesar 110 indeks dengan realisasi sebesar 99 indeks.



Tabel 3. 7 Target Jangka Menengah SK III dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	80	81	82	83	99 indeks	110 indeks

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dari indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah dikarenakan telah terpenuhinya kepuasan layanan masyarakat, parameter derajat kesehatan narapidana/anak/tahanan, keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat, pelayanan tahanan, pengelolaan barang, keberhasilan pembinaan narapidana, pemenuhan hak narapidana, pembinaan khusus anak, keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsi masyarakat, yang diantaranya melakukan pembinaan dan teknis di bidang masyarakat, melakukan koordinasi pelaksanaan teknis di bidang masyarakat, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang masyarakat.



SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya pelayanan tahanan di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase menurunnya tahanan yang overstaying”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase menurunnya tahanan yang overstaying. Pada tahun 2023 terdapat jumlah rata-rata tahanan yang overstaying sebanyak 31 orang tahanan dari jumlah rata-rata seluruh tahanan sebanyak 460 orang. Target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi sebesar 94% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - \text{jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{460 - 31}{460} \times 100\%$$

$$\% = 93\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 103\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut telah terjadinya kenaikan terhadap menurunnya tahanan yang overstaying dengan capaian kinerja sebesar 103% dengan target sebesar 90%. Dari data diatas terhadap menurunnya tahanan yang overstaying tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan berkas dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Wilayah. Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 103% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan



sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	93%	103%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target Persentase menurunnya tahanan yang overstaying di Lapas/Rutan/ telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya adalah 93% sehingga capaian kinerjanya adalah 103%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 80% meningkat pada tahun 2023 sebesar 93% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%	90%	93%	103%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian yaitu 103% untuk tahun 2023 dan 100% untuk tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan tahun 2023 sebesar 90% dengan realisasi sebesar 93%.



Tabel 3. 10 Target Jangka Menengah SK III dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	90%	93%	103%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase menurunnya tahanan yang overstaying di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Telah terjadinya penurunan tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan dengan realisasi yang telah mencapai target. Terjadi peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya dikarenakan masih sedikitnya Tahanan yang menerima keterlambatan surat perpanjangan penahanan mereka yang telah bebas dari pihak APH di Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan tersebut yaitu diperlukan suatu kordinasi yang baik antara para Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan Pihak Lapas/Rutan, namun dalam hal ini untuk lebih memudahkan suatu kordinasi antara para penegak hukum yang lain (antara Rutan dan penahan) dibutuhkan suatu system IT dalam melakukan suatu koordinasi sehingga apabila ada terdakwa atau tersangka masa penahanannya akan habis maka dapat dikordinasikan langsung kepada pihak penahan sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak penahan tanpa menggunakan surat tetapi langsung tersambung dengan pihak Lapas/Rutan, sehingga surat penahanannya dapat diperbaharui dengan cepat dan status Hukum dari terdakwa dan tersangka dapat jelas, dan overstaying dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dari permasalahan Lapas/Rutan saat ini.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan. Di tahun 2023 terdapat Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum sebanyak 671 orang dengan jumlah tahanan sebanyak 460 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{671}{460} \times 100\%$$

$$\% = 146\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{146}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 162\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 162% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	146%	162%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Lapas/Rutan/ belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya adalah 146% sehingga capaian kinerjanya adalah 162%. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini telah melebihi target yang ditetapkan.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan tahun 2022, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 88% meningkat apabila dibandingkan dengan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 146%.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	88%	110%	90%	146%	162%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat persamaan capaian dari 110% menjadi 162%, hal itu dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 90%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 telah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan tahun 2023 sebesar 162% dengan realisasi 146%.

Tabel 3. 13 Target Jangka Menengah SK III dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	80%	90%	90%	146%	162%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja Persentase tahanan yang



memperoleh layanan penyuluhan hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kinerja kegiatan Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum ini bisa dikatakan berhasil dikarenakan di setiap Lapas/Rutan telah melakukan kegiatan pendampingan atau sosialisasi tentang penyuluhan hukum terhadap Tahanan/Narapidana hampir di setiap bulannya di tahun 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum yaitu dengan membuat jadwal pelaksanaan pelayanan hukum kepada tahanan dengan memanfaatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan. Di tahun 2023 terdapat Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum sebanyak 331 orang dengan jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum sebanyak 344 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung realisasinya sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum}}{\text{Jumlah pemohon bantuan hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{331}{344} \times 100\%$$

$$\% = 96\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{96}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 106%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	96%	106%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya adalah 96% sehingga capaian kerjanya adalah 106%, ini disebabkan karena dari semua tahanan yang mengajukan usulan untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum telah terealisasi atau telah diterima.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan untuk tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 67% meningkat pada Tahun 2023 sebesar 96% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80%	67%	84%	90%	96%	106%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 84% dengan realisasi sebesar 67%, sedangkan untuk capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 106% dengan realisasi sebesar 96%.



Untuk data dari LPKA tidak pernah mengajukan Bantuan Hukum Litigasi Karena telah ditunjuk dari pos Bankum Pengadilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 telah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan tahun 2023 meningkat sebesar 106% dengan realisasi 96%.

Tabel 3. 16 Target Jangka Menengah SK III dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	70%	80%	90%	90%	96%	106%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan pada indikator kinerja persentase jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dikarenakan semua tahanan yang mengajukan usulan untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum rata-rata telah terealisasi atau telah diterima.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum yaitu dengan cara terus melakukan sosialisasi bantuan hukum kepada tahanan yang benar-benar membutuhkan.



SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik sebanyak 3.228 orang dengan jumlah narapidana yang dinilai sebanyak 3.844 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik}}{\text{Jumlah narapidana yang dinilai}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3.288}{3.844} \times 100\%$$

$$\% = 85\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{85}{70} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 121 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 121% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	85%	121%



Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 85% sehingga capaian kinerjanya adalah 121%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 93% menurun untuk pada tahun 2023 sebesar 7% terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	93%	143%	70%	85%	121%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 143% menjadi 121% dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 65%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target untuk pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 sebesar 121% dengan realisasi 85%.



Tabel 3. 19 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	70%	85%	121%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pada narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan karena sekarang sudah ada instrumen SPPN sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penilaian kepribadian.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian yaitu dengan Pihak Lapas agar selalu konsisten memberikan pembinaan kepribadian bagi WBP yang bekerjasama dengan Pihak terkait sehingga dengan banyaknya pembinaan kepribadian maka penilaian kepribadian WBP dapat meningkat

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Berikut tabel narapidana yang mendapatkan hak remisi.



Tabel 3. 20 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

No	Jenis Remisi	Jumlah Napi yang di usulkan Remisi	Jumlah yang memperoleh Remisi
1	Remisi Imlek	7	5
2	Remisi Nyepi	0	0
3	Remisi Idul Fitri	1.429	1.303
4	Remisi Waisak	38	38
5	Remisi 17 Agustus	1.587	1.551
6	Remisi Natal	36	36
Total		3.097	2.933

Berdasarkan data diatas didapat penghitungan rekapitulasi narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh remisi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2.933}{3.097} \times 100 \%$$

$$\% = 100,2\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100,2}{99} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 102\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 102% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh hak remisi	99%	100,2%	102%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang memperoleh hak remisi telah tercapai dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 99% sedangkan



realisasinya adalah 100,2% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang memperoleh hak remisi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 97% menurun bila dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 100,2%.

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	97%	99%	99%	100,2%	102%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian yaitu sebesar 3% dikarenakan terdapat perbedaan target sebesar 98% pada tahun 2022 dan 99% pada tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2023 sebesar 100,2% dengan realisasi 102%.

Tabel 3. 23 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	99%	100,2%	102%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pada narapidana yang



mendapatkan hak remisi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak remisi yaitu adanya peran aktif wali masyarakat dan asesor masyarakat sehingga menurunnya tingkat resiko warga binaan dan dapat diusulkan hak bersyaratnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak remisi yaitu Divisi Masyarakat terus melakukan Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan kepada Lapas/Rutan dan LPKA terkait pengusulan remisi bagi narapidana maupun bagi anak didik sesuai dengan kalender pengusulan remisi di tahun berjalan sehingga tidak ada keterlambatan dalam pengusulan remisi. Disamping itu, Pihak Lapas/Rutan dan LPKA aktif dalam melaksanakan program kegiatan Kamandirian dan Kepribadian.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. Pada Tahun 2023 terdapat Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial sebanyak 940 yang terdiri dari 458 orang narapidana yang telah mendapatkan hak untuk Pembebasan Bersyarat (PB) dan telah menjalankan 2/3 masa tahanan, 195 orang narapidana yang telah mendapatkan hak Cuti Bersyarat (CB) sedangkan sebanyak 287 orang WBP atau Narapidana yang mendapatkan hak untuk asimilasi rumah. Adapun Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial sebanyak 1.293 orang yang terdiri dari 628 orang narapidana yang mengajukan usulan Persyaratan Bersyarat (PB) dan sebanyak 383 orang narapidana yang mengajukan usulan Cuti Bersyarat (CB)



sedangkan untuk program asimilasi rumah terdapat 282 orang narapidana yang mengusulkan untuk hak asimilasi rumah. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan integrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{940}{1.293} \times 100\%$$

$$\% = 73\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{73}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 86\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 86% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	73%	86%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi belum mencapai target dikarenakan per bulan Juni 2023 untuk program asimilasi telah ditiadakan sehingga mengurangi data usulan untuk pengajuan mendapat hak integrasi bagi narapidana. Dengan demikian untuk indikator kinerja kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 73% sehingga capaian kinerjanya mencapai 86%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Wilayah



Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 126% menurun pada tahun 2023 sebesar 73% dikarenakan per bulan Juni tahun 2023 telah tidak diberlakukannya program asimilasi rumah atau untuk program asimilasi sudah ditiadakan, dan juga terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	126%	158%	85%	73%	86%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 126% menjadi 86% dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 80%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum tercapai. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2023 sebesar 86% dengan realisasi 73%.

Tabel 3. 26 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	85%	73%	86%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan per bulan Juni tahun 2023 untuk program Asimilasi Rumah telah ditiadakan sehingga tidak ada WBP yang mengajukan program asimilasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak integrasi yaitu Divisi Pemasarakatan terus melakukan supervisi kepada Lapas/Rutan dan LPKA terkait pengusulan hak integrasi bagi narapidana maupun bagi anak didik sehingga tidak ada keterlambatan dalam pengusulan hak integrasi. Selain itu, pihak Lapas/Rutan/LPKA berupaya memenuhi yang menjadi hak-hak wbp/narapidana terkait hak integrasi seperti pengajuan PB dan CB dan program Asimilasi.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah narapidana yang memiliki latar belakang Pendidikan sebanyak 484 orang dengan jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan sebanyak 300 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah narapidana tidak memiliki latar belakang pendidikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{300}{484} \times 100\%$$

$$\% = 62\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{62}{85} \times 100\%$$



Capaian = 72,9%

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama pada tahun 2023 sebesar 72,9% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	62%	72,9%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 62% sehingga capaian kinerjanya adalah 72,9%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 70% menurun pada tahun 2023 sebesar 8% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK IV

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	70%	88%	85%	62%	72,9%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 88% menjadi 72,9% dikarenakan beberapa Lembaga Masyarakat belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2023 sebesar 72,9% dengan realisasi 62%.

Tabel 3. 29 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	85%	62%	72,9%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pada narapidana yang mendapatkan hak pendidikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Indikator ini belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa Lapas yang belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan Kejar Paket A, B, dan C.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak pendidikan yaitu dengan cara memerintahkan Lapas/Rutan yang belum melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk segera melaksanakan PKS sehingga Hak pendidikan bagi WBP dapat terpenuhi.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin. Pada tahun 2023 rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin terdapat sebanyak 32 orang dengan jumlah narapidana yang beresiko tinggi sebanyak 52 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang berubah perilaku}}{\text{Jumlah narapidana resiko tinggi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{32}{52} \times 100\%$$

$$\% = 61,5\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{61,5}{17} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 362\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 588% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 30 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	61,5%	362%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 17% sedangkan realisasinya adalah 61,5%



sehingga capaian kinerjanya adalah 362%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% mengalami persamaan realisasi yaitu sebesar 38,5% pada tahun 2023.

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK V

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	15%	100%	667%	17%	61,5%	362%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 667% menjadi 362% dikarenakan terdapatnya perbedaan target pada tahun 2022 sebesar 15% sedangkan target untuk tahun 2023 sebesar 17%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin pada tahun 2023 sebesar 362% dengan realisasi 61,5%.

Tabel 3. 32 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13 %	15 %	17%	17%	61,5%	362%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pada narapidana resiko



tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Indikator kinerja ini dapat tercapai dikarenakan semua narapidana resiko tinggi telah sadar dan patuh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin yaitu Pihak lapas agar melaksanakan pembinaan kepada Narapidana resiko tinggi dengan mengacu pada aturan yang telah ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan voaksi bersertifikasi. Pada tahun 2023 terdapat jumlah target narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi sebanyak 295 orang dengan jumlah napi sebanyak 1974 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah narapidana yang dinilai}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{295}{1.974} \times 100\%$$

$$\% = 14\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{14}{31} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 45\%$$

Dengan demikikan diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 45%



sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 33 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	14%	45%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi dan bersertifikasi belum tercapat. Target yang ditetapkan adalah sebesar 31% sedangkan realisasinya adalah 14% sehingga capaian kinerjanya adalah 45%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 38% menurun pada tahun 2023 sebesar 24% dikarenakan keterbatasannya tenaga pengajar yang bekerja sama dengan pihak Lapas/Rutan/Anak, sehingga kurangnya minat WBP untuk melanjutkan Pendidikan dan pelatihan vokasi yang bersertifikat.

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK VI

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	38%	136%	31%	14%	45%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 136% menjadi 45% dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 28% dan 31% untuk tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam



rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 sebesar 45% dengan realisasi 14%.

Tabel 3. 35 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	31%	14%	45%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi berpendidikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini belum dikatakan berhasil dikarenakan keterbatasannya tenaga pengajar yang bekerja sama dengan Lapas/Rutan/Anak, sehingga kurangnya minat dr wbp untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan vokasi yang bersertifikat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi berpendidikan yaitu agar pihak lapas dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi berpendidikan diberikan kepada WBP yang berbeda dalam setiap pelatihannya sehingga banyak WBP yang mempunyai bekal keahlian bagi mereka setelah keluar dari Lapas/Rutan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase



narapidana bekerja dan produktif. Pada Tahun 2023 lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat jumlah narapidana yang bekerja dan produkti sebanyak 557 orang, sedangkan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi rumah sebanyak 232 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang asimilasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{557}{232} \times 100\%$$

$$\% = 240\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{240}{72} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 333\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 333% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana bekerja dan produktif	72%	240%	333%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang bekerja dan produktif belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 72% sedangkan realisasinya adalah 240% sehingga capaian kinerjanya adalah 333%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Wilayah Kementerian



Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% menurun pada tahun 2023.

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK VII

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana bekerja dan produktif	67%	100%	149%	72%	240%	333%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 149% menjadi 333%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2023 sebesar 333% dengan realisasi 240%.

Tabel 3. 38 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	72%	240%	333%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase persentase narapidana yang bekerja dan produktif di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini dikatakan telah berhasil dilaksanakan karena telah melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena telah banyaknya narapidana yang bekerja dan produktif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase narapidana yang bekerja dan produktif yaitu pihak



Lapas/Rutan/LPKA tetap memperhatikan dan memberikan informasi terkait hak-hak dari narapidana/anak yang harus diterima dengan memperhatikan syarat-syarat secara umum yakni telah menjalani masa hukuman dalam jangka waktu tertentu, melaksanakan kegiatan di dalam rutan dengan baik dan disiplin, serta berkelakuan baik. Tidak hanya itu, syarat administrasi juga perlu dilengkapi. Selain itu, juga pihak Lapas/Rutan agar benar-benar mempekerjakan WBP yang telah memenuhi persyaratan dan memang mempunyai keahlian pada bidangnya.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran sebanyak 34 unit, dengan jumlah penilaian Depresiasi Basan Baran sebanyak 36 unit. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi lelang basan baran}}{\text{Jumlah penilaian depresiasi basan baran}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{34}{36} \times 100\%$$

$$\% = 94\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{94}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 117% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 39 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	94%	117%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 94% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% menurun pada tahun 2023 sebesar 94%.

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK SK V dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	143%	80%	94%	117%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 143% menjadi 117% dikarenakan semua basan baran yang ada telah terjaga kualitas dan kuantitanya, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi 94%.

Tabel 3. 41 Target Jangka Menengah IKK SK V dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	80%	94%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini telah melebihi dari target yang ditetapkan karena semua basan baran sudah terjaga kualitas dan kuantitasnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya yaitu dengan cara melakukan pengecekan secara berkala.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap. Adapun Jumlah benda sitaan dan barang



rampasan yang Inkrah sebanyak 12 macam, dengan jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi sebanyak 2 macam. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah benda sitaan yang telah inkrah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{12} \times 100\%$$

$$\% = 17\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{17}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 21,25 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 21,25% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	17%	21,25%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap belum melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 17% sehingga capaian kinerjanya adalah 21,25%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap di Wilayah Kementerian



Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% menurun sebesar 83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 17%.

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	100%	167%	80%	17%	21,25%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 167% menjadi 21,25% dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum tercapai. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap tahun 2023 sebesar 21,25% dengan realisasi 17%.

Tabel 3. 44 Target Jangka Menengah SK V dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	40%	60%	80%	80%	17%	21,25%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini belum dikatakan berhasil atau belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan yaitu :

- Adanya masalah pengelolaan barang rampasan ini belum memberikan manfaat optimal kepada negara dan ada kecenderungan barang rampasan tidak terawat, terbengkalai sehingga nilainya semakin lama semakin turun.
- Adanya Keterbatasan sarana pendukung dan anggaran pemeliharaan pada barang rampasan yang jumlahnya relatif banyak.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap yaitu dengan cara berkoordinasi dengan APH terkait yang menitipkan barang-barang pada Rupbasan sehingga barang yang dititipkan status hukumnya jelas. Disamping itu, melakukan perbaikan dengan pendekatan strategis, komprehensif, integratif dan melibatkan seluruh stakeholder sehingga terdapat kesamaan langkah guna mengoptimalkan manfaat barang rampasan negara.

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien dan Pemenuhan hak Pendidikan Klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kegiatan yaitu :

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga. Di tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat jumlah klien usia produktif sebanyak 1995 orang, dengan Jumlah Klien yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga sebanyak 1874 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator



tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan di luar lembaga}}{\text{Jumlah klien usia produktif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1874}{1995} \times 100\%$$

$$\% = 94\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94}{60} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 156 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 156% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 45 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	60%	94%	156%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga telah melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 60% sedangkan realisasinya adalah 94% sehingga capaian kinerjanya adalah 156%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 82% meningkat pada tahun 2023 sebesar 94% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.



Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50%	82%	164%	60 %	94%	156 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 164% menjadi 156%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 60%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga tahun 2023 sebesar 94% dengan realisasi 156%.

Tabel 3. 47 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	40%	50 %	60%	60%	94%	156%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan telah banyak klien usia produktif yang melanjutkan pekerjaan setelah bebas dari Lapas.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga yaitu dengan cara Pihak Bapas atau PK dari Bapas terus melakukan kerjasama dengan Pihak terkait melalui Pokmas Pemasarakatan untuk memberikan wadah kepada Klien Pemasarakatan yang belum mendapatkan pekerjaan untuk bekerja pada Pokmas yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara. Di tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat jumlah kasus anak sebanyak 35 orang, dengan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebanyak 25 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah pendampingan anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{25}{35} \times 100\%$$

$$\% = 71\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{71}{55} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 129\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama pada tahun 2023 sebesar 129% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	71%	129%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 55% sedangkan realisasinya adalah 71% sehingga capaian kinerjanya adalah 129%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 51% meningkat pada tahun 2023 sebesar 71%.

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	51%	85%	55%	71%	129%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 71% menjadi 129%, dikarenakan berhasilnya proses diversi sehingga turunnya angka kriminalitas yang terjadi pada anak, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 55%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2023 sebesar 129% dengan



realisasi 71%.

Tabel 3. 50 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	60%	55%	55%	71%	129%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini dikatakan telah mencapai target yang di tetapkan dikarenakan berhasilnya proses diversifikasi yang dilakukan oleh LPH yang bekerja sama dengan pihak LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara yaitu dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Masyarakat (PK) dalam melakukan diversifikasi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan anak.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya. Pada tahun 2023 jumlah anak yang terpenuhi hak pendidikannya sebanyak 46 orang, dengan jumlah klien anak sebanyak 50 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan}}{\text{Jumlah klien anak}} \times 100\%$$



$$\% = \frac{46}{50} \times 100\%$$

$$\% = 92\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{92}{35} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 262\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 262% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	92%	262%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 35% sedangkan realisasinya adalah 92% sehingga capaian kinerjanya adalah 262%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 73% meningkat pada tahun 2023 sebesar 92% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	73%	243%	35%	92%	262%



Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 243% menjadi 262%, dikarenakan banyaknya klien anak yang melanjutkan pendidikan yakni mengikuti sekolah paket atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi setelah bebas dari LPKA.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk indikator realisasi persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tahun 2023 sebesar 262% dengan realisasi sebesar 92%.

Tabel 3. 53 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	35%	92%	262 %

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan banyaknya klien anak yang melanjutkan pendidikan yakni mengikuti sekolah paket atau melanjutkan ke Tingkat yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi setelah bebas dari LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan non formal dalam pembinaan kepribadian, kerohanian serta mendapat dukungan dari pengasuh anak didik.



SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat. Pada tahun 2023 ini terdapat jumlah anak yang terampil sebanyak 10 orang, jumlah anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan sebanyak 10 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama pada tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak



yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 62,5% penurunan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	62,5%	83%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, terdapat peningkatan capaian dari 83% menjadi 125%, dikarenakan pada tahun 2023 terdapat jumlah anak yang terampil setara dengan jumlah anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 telah terlampaui dikarenakan memang pihak LPKA telah melaksanakan kegiatan keterampilan pada di tahun 2023 sesuai dengan harapan yakni dengan jumlah anak yang terampil setara dengan jumlah anak yang mengikuti keterampilan, sehingga Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat tahun 2023 sebesar 125%.



Tabel 3. 56 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	75%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada Indikator ini dikatakan berhasil dikarenakan pihak LPKA telah melaksanakan kegiatan keterampilan pada di tahun 2023 sesuai dengan harapan yakni dengan jumlah anak yang terampil setara dengan jumlah anak yang mengikuti keterampilan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat yaitu pihak LPKA agar terus meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya serta pelatihan berkelanjutan sehingga kegiatan keterampilan yang telah diikuti ada tindaklanjutnya terhadap pendidikan keterampilan dan bersertifikat bagi anak didik.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase anak yang memperoleh hak integrasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang memperoleh hak integrasi. Di tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi sebanyak 25 orang sedangkan Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi sebanyak 25 orang. Berdasarkan data diatas maka



dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah anak yang memenuhi syarat untuk dapat reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{25}{25} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 57 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak yang memperoleh hak integrasi telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase anak yang memperoleh hak integrasi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% sama rata pada tahun 2023 sebesar 100% dikarenakan terdapat persamaan target pada tahun 2022.



Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat persamaan capaian dari 100% menjadi 100%, dikarenakan adanya persamaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah tercapai. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang memperoleh hak integrasi tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 59 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan persentase anak yang memperoleh hak integrasi ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi telah memperoleh hak integrasinya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan



persentase anak yang memperoleh hak integrasi yakni Divisi Pemasarakatan melakukan supervisi secara berkala terkait pengsulan integrasi anak didik pemsarakatan sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam pengsulan hak integrasi anak.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar. Untuk tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat jumlah Anak yang memperoleh hak pengasuhan sebanyak 26 orang, dengan Jumlah total Anak sebanyak 26 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 111% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 60 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	90%	100%	111%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak



yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar belum mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 111%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 87% meningkat pada tahun 2023 sebesar 13% dengan realisasi sebesar 100% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	80%	87%	109%	90%	100%	111%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 109% menjadi 111%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 90%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar tahun 2023 sebesar 111% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 62 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	70%	80%	90%	90%	100%	111%



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar ini telah mencapai target dikarenakan setiap anak dipastikan telah mendapatkan hak pengasuhan yang sama sesuai dengan standar yang ditentukan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar yaitu Divisi Pemasarakatan melakukan supervisi secara berkala terkait pengasuhan bagi anak didik pemsarakatan di LPKA.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal. Pada tahun 2023 Jumlah Anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal sebanyak 58 orang, dengan Jumlah total Anak sebanyak 61 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah narapidana yang dinilai}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{58}{61} \times 100\%$$

$$\% = 95\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



$$\text{Capaian} = \frac{95}{90} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 105\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 105% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi IKK SK VII dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	95%	105%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya adalah 95% sehingga capaian kinerjanya adalah 105%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 84% meningkat pada tahun 2023 sebesar 11% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK IV

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	84%	105%	90%	95%	105%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 105% menjadi 105%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 90%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal tahun 2023 sebesar 105% dengan realisasi sebesar 95%.

Tabel 3. 65 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	80%	90%	90%	95%	105%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal ini dikarenakan rata-rata semua anak telah mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal yaitu Divisi Pemasarakatan tetap memantau pihak LPKA untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pendidikan formal dan non formal.



SASARAN KEGIATAN 8

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pengaduan yang diselesaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pengaduan yang diselesaikan. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan pada lapas/Rutan alias NIHIL. Dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan, jadi otomatis realisasinya sudah tercapai 100%.

Tabel 3. 66 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	117%

Dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan maka dapat diketahui bahwa persentase pengaduan yang diselesaikan telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pengaduan yang diselesaikan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% mengalami persamaan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan pada lapas/Rutan alias NIHIL. Otomatis realisasi nya menjadi 100% dan dikatakan berhasil dalam mengatasi permasalahan yang ada pada Lapas/Rutan.



Tabel 3. 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%	85%	100%	117 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 125% menjadi 117%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pengaduan yang diselesaikan tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 68 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	80%	85%	80%	100%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kerjanya pada indikator persentase pengaduan yang diselesaikan ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk pada Lapas/Rutan sehingga bisa dikatakan berhasil dalam penanganan permasalahan di Lapas/Rutan.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pengaduan yang diselesaikan yaitu:

- a. Pihak Lapas/Rutan berupaya mengoptimalkan yang menjadi hak-hak dari WBP seperti layanan program integrasi dan asimilasi.
- b. Menyediakan layanan pengaduan seperti kotak saran, dan kontak pengaduan.
- c. Melakukan penyelesaian terhadap pengaduan Keamanan dan ketertiban yang masuk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dengan aturan yang berlaku.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase pencegahan gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pencegahan gangguan kamtib. Pada tahun 2023 tidak terdapat gangguan kamanan dan ketertiban yang ada di Lapas/Rutan pada bulan tahun 2023. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3. 69 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase pencegahan gangguan kamtib telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pencegahan gangguan kamtib di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% sama pada tahun 2023 dikarenakan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Lapas/Rutan.

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 143% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pencegahan gangguan kamtib tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.



Tabel 3. 71 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	70%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan persentase pencegahan gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang ada pada Lapas/Rutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pencegahan gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan/LPKA dan Divisi Pemasyarakatan terus berupaya melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta deteksi dini terkait keamanan dan ketertiban di dalam Lapas tersebut seperti memperketat SOP pengamanan dari dalam maupun dari luar. Selain itu, juga memberikan sosialisasi terkait saber pungli, peredaran narkoba dan sanksi yang diberikan bagi WBP yang melakukan pelanggaran hal tersebut.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib. Pada tahun 2023 tidak terdapat pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku yang ada di Lapas/Rutan alias NIHIL.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 100%



sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 72 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% sama pada tahun 2023 dikarenakan tidak terdapatnya pelaku gangguan terhadap keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA.

Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 125% menjadi 117%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 74 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	85%	100%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua pelaku gangguan kemandirian dan ketertiban telah sadar dan patuh terhadap peraturan yang ada pada Lapas/Rutan/LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pencegahan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA benar-benar harus memberlakukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah di buat oleh pelaku gangguan kemandirian dan ketertiban sehingga ada efek jera bagi pelaku.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Pada tahun 2023 tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban alias NIHIL. Dengan otomatis realisasinya tercapai 100% yang diartikan bahwa adanya keberhasilan dalam penanganan kamtib dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasyarakatan.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 75 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 sebesar 100% dikarenakan telah tertanganinya dalam penanganan/pengawasan kamtib dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasyarakatan.



Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK IV

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 143% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk indikator realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 77 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yakni dikarenakan keberhasilan dalam penanganan kamtib



dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasyarakatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yaitu yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta kondisi, yang dimaksud dengan “cipta kondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan pada lapas/Rutan alias NIHIL. Dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan, jadi otomatis realisasinya sudah tercapai 100%.

Tabel 3. 78 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%

Dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk ke dalam Lapas/Rutan



maka dapat diketahui bahwa persentase pengaduan yang diselesaikan telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% mengalami persamaan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan pada lapas/Rutan alias NIHIL. Otomatis realisasi nya menjadi 100% dan dikatakan berhasil dalam mengatasi permasalahan yang ada pada Lapas/Rutan.

Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 125% menjadi 117%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.



Tabel 3. 80 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kerjanya pada indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk pada Lapas/Rutan sehingga bisa dikatakan berhasil dalam penanganan permasalahan di Lapas/Rutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yaitu dengan melakukan penyelesaian terhadap pengaduan keamanan dan ketertiban yang masuk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dengan aturan yang berlaku.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. dikarenakan tidak terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban alias NIHIL, sehingga tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah dengan otomatis realisasinya tercapai 100% yang diartikan bahwa adanya keberhasilan dalam penanganan Keamanan dan Ketertiba dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor



Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasyarakatan.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 81 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% sama pada tahun 2023 dikarenakan semua isu tentang gangguan kamtib dapat dicegah dengan baik, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 143% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 83 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	70%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan tidak terdapat isu maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA, sehingga tidak adanya gangguan kamtib yang dapat dicegah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu pihak Lapas/Rutan/LPKA dan Divisi Pemasyarakatan terus berupaya melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta Deteksi Dini terkait Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas tersebut seperti memperketat SOP pengamanan dari dalam maupun dari luar. Selain itu, juga memberikan sosialisasi terkait saber pungli, peredaran narkoba dan sanksi yang diberikan bagi WBP yang melakukan pelanggaran hal tersebut serta memberikan pembekalan terhadap petugas Lapas/Rutan/LPKA dalam hal penanganan keamanan seperti peningkatan mental fisik pegawai.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib. Pada tahun 2023 tidak terdapat pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku yang ada di Lapas/Rutan alias NIHIL.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 84 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%	100 %	117%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% sama pada tahun 2023 dikarenakan semua pelaku gangguan kamtib telah sadar dan patuh, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.



Tabel 3. 85 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 125% menjadi 117%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 86 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	85%	100%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kerjanya pada indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/



narapidana/anak pelaku gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua pelaku gangguan keamanan dan ketertiban telah sadar dan patuh terhadap peraturan yang ada pada Lapas/Rutan/LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pencegahan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA benar-benar harus memberlakukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah di buat oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sehingga ada efek jera bagi pelaku.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Pada tahun 2023 tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban alias NIHIL. Dengan otomatis realisasinya tercapai 100% yang diartikan bahwa adanya keberhasilan dalam penanganan kamtib dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasyarakatan.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 87 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 125%.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan pada tahun 2023 dan 2022, realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun 2023 sebesar 100% dikarenakan telah tertanganinya dalam penanganan/pengawasan kamtib dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasarakatan, hal ini juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2022.

Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IX dan IKK IV

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	80%	100%	125 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 143% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk indikator realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 89 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	80%	100%	125%



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yakni dikarenakan keberhasilan dalam penanganan kamtib dengan cara deteksi dini yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan yang tentunya tetap diawasi oleh Kantor Wilayah yang dalam hal ini yaitu Divisi Pemasarakatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yaitu yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta kondisi, yang dimaksud dengan “cipta kondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.



SASARAN KEGIATAN 10

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak. Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 8 (delapan) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Pada tahun 2023 pihak Lapas/Rutan telah melakukan pemenuhan pelayanan makanan sesuai dengan postur atau jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang ada dan tentunya dengan standar yang berlaku yang ditetapkan. Adapun jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sebanyak 2449 orang dan Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak sebanyak 2449 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemenuhanan layanan makanan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2.449}{2.449} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan



sebagai berikut :

Tabel 3. 90 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya indikator kinerja kegiatan dimaksud, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 91 Target Jangka Menengah SK X dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	0	0	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional



mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar yakni dikarenakan pemenuhan layanan makanannya telah diperhitungkan dengan benar serta layak dan sesuai standar.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA harus berupaya memperhatikan kelayakan, kehegineisan dan kecukupan makanan yang akan diberikan kepada para WBP dengan postur dan jumlah yang sesuai standar.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas. Pada tahun 2023 pihak Lapas/Rutan telah melakukan kegiatan pencegahan terhadap WBP yang mengalami suatu masalah kesehatan atau penyakit yang dalam hal ini sangat dianjurkan untuk diberikan layanan khusus sesuai dengan postur dan tentunya dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Adapun Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas sebanyak 2449 orang dan Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak sebanyak 2449 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak}} \times 100 \%$$



$$\% = \frac{2.449}{2.449} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{94} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 106\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 106% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 92 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 94% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 106%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023 sebesar 106% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 93 Target Jangka Menengah SK X dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	0	0	94%	94%	100%	106%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas yakni dikarenakan pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan bagi WBP yang benar benar membutuhkan terpenuhi dan sesuai standar.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA harus berupaya memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi WBP yang benar benar membutuhkan.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal. Pada tahun 2023 jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal sebanyak 1 orang. Dan Jumlah Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) sebanyak 1 orang Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan atau narapidana perempuan (Ibu hamil menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan atau narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{97} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 103\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 103% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 94 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	97%	100%	103%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal telah mencapai target yang ditetapkan. Target



yang ditetapkan adalah sebesar 97% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 103%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2023 sebesar 103% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 95 Target Jangka Menengah SK X dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	0	0	97%	97%	100%	103%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas yakni dikarenakan pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan bagi wbp benar benar membutuhkan sesuai standar.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yaitu pihak Lapas/Rutan harus berupaya memberikan layanan kesehatan berupa suplai makanan yang lebih dan memberikan pemeriksaan rutin.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. Pada tahun 2023 jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental tertangani sebanyak 2 orang. Dan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental sebanyak 2 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$



Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 96 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.



Tabel 3. 97 Target Jangka Menengah SK X dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0	0	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yakni dikarenakan petugas kesehatan pada Lapas/Rutan selalu memberikan edukasi terhadap wbp dan bekerja sama dengan wali masyarakat atau pembina kepribadian dalam hal kesehatan mental.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yaitu pihak Lapas/Rutan melakukan penyuluhan, pengamatan dan bimbingan melalui kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan mental.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase Tahanan/Narapidana/ lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sebanyak 37 dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan



sebanyak 37 orang.

Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{37}{37} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 117 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 117% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 98 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase Tahanan/Narapidana/lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak



bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 99 Target Jangka Menengah SK X dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar	0	0	85%	85%	100%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kerjanya pada indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar yakni dikarenakan petugas kesehatan pada Lapas/Rutan memberikan prioritas layanan Kesehatan dibandingkan dengan WBP lainnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan



kesehatan sesuai standar yaitu petugas kesehatan pada Lapas/Rutan memberikan prioritas layanan Kesehatan dibandingkan dengan WBP lainnya.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 20 orang dengan Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan sebanyak 20 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{20}{20} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 117 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 117% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 100 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%



Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 117% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3. 101 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar	0	0	85%	85%	100%	117%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang



mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yakni dikarenakan petugas kesehatan pada Lapas/Rutan memberikan prioritas layanan Kesehatan dibandingkan dengan WBP lainnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan sesuai standar yakni petugas kesehatan pada Lapas/Rutan memberikan prioritas layanan Kesehatan dibandingkan dengan WBP lainnya.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Pada tahun 2023 diketahui jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya sebanyak 6 orang, Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS sebanyak 17 orang, Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh sebanyak 1 orang, Jumlah Narapidana dengan TB Positif sebanyak 33 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah narapidana dengan TB Positif}} \times 100 \%$$

$$A = \frac{6}{17} \times 100\%$$

$$A = 35\%$$



$$B = \frac{1}{33} \times 10 \%$$

$$B = 3\%$$

$$\% = \frac{\text{Keberhasilan penanganan narapidanan dengan HIV – AIDS} + \text{Keberhasilan penanganan narapidanan TB Ppositif}}{2} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{(35\% + 3\%)}{2} \times 100\%$$

$$\% = 19\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{19}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 23,75\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 23,75% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan

Tabel 3. 102 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	19%	23,75%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 19% sehingga capaian kinerjanya adalah 23,75%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022



tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2023 sebesar 19% dengan realisasi sebesar 23,75%.

Tabel 3. 103 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	0	0	80%	80%	19%	23,75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kinerja kegiatan ini belum dikatakan berhasil dalam realisasi maupun capaian kinerjanya dari target yang ditentukan untuk Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dikarenakan per bulan November tahun 2023 telah dilakukan Kegiatan ACF TBC Melalui Skrining Gejala dan Intervensi Chest X-ray (Mobile Rontgen) kepada 206.330 Tahanan/Narapidana/Anak di 374 UPT Pemasarakatan pada 33 Kantor



Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023. Sehingga terdeteksi jumlah narapidana lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang positif TB jadi untuk narapidana yang berhasil sembuh belum ada karena belum habis masa pengobatannya sampai dengan berakhirnya tahun 2023.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yakni petugas kesehatan di klinik pada Lapas/Rutan bekerja sama dengan Puskesmas setempat berupaya dengan rutin melakukan skrining setiap bulannya dan langsung ditangani secara maksimal dan optimal serta selalu dipantau perkembangannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2023 terdapat Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 250 orang Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi sebanyak 180 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup narapidanan pecandu atau penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika}}{\text{Jumlah perubahan kualitas hidup narapidanan pecandu atau penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{180}{250} \times 100\%$$

$$\% = 72\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



$$\text{Capaian} = \frac{72}{27} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 266\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 72% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 104 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	72%	266%

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 27% sedangkan realisasinya adalah 72% sehingga capaian kinerjanya adalah 266%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada indikator kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya tidak bisa perbandingkan dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapatnya Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud atau hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan serta perbandingannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tahun 2023



sebesar 85% dengan realisasi sebesar 72%.

Tabel 3. 105 Target Jangka Menengah SK X dan IKK VIII

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	0	0	27%	27%	72%	266%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran Indikator kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya penurunan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yakni dikarenakan kuota untuk jumlah narapidana yang mengikuti program rehabilitasi sudah ditentukan dari Direktorat Jenderal sehingga tidak sebanding dengan jumlah narapidana korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas Narkotika.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yakni dengan melakukan kegiatan pembinaan kerohanian dan kemandirian yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan BLKI serta tetap dalam pemantauan dari Wali masyarakatan.



SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung tidak melaksanakan langsung survei kepada pengguna layanan keimigrasian. Dalam hal ini, untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah Divisi Keimigrasian mengambil hasil survey dari Unit Pelaksana Teknis. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Tahun 2023 dilakukan perhitungan atas penggabungan indeks dari masing-masing Kantor Imigrasi di wilayah provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai



Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Tahun 2023 adalah target 3,98 yang didapat dari nilai rerata indeks kepuasan masyarakat dari seluruh Kantor Imigrasi.

Tabel 3. 106 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kode Satker	Nama Satker	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Nilai	Responden
	Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung	3,99	771
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	3,98	376
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	3,99	395

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2022 sebanyak 771 responden yang terdiri dari 2 Unit Pelaksana Teknis di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang : 395 Responden
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpanda : 376 Responden

Hasil SKM Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di wilayah adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122%.



Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,99}{3,25} \times 100\% = 122\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah pada tahun 2023, telah tercapai.

Tabel 3. 107 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	3.99	122%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,99 dan 2021 sebesar 3,93 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 indeks. Hal ini diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah stabil dalam kenaikan dan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3. 108 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XI dan IKK I

Indikator	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,93	124%	3,20	3,99	124%	3,25	3,99	122%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 120%.



Tabel 3. 109 Target Jangka Menengah SK XI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30	3,99	122%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Bangka Belitung tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh satuan kerja imigrasi kepada pengguna layanan, seperti:

1. Layanan paspor kepada WNI
2. Layanan izin tinggal kepada WNA
3. Inovasi layanan keimigrasian yang dibuat oleh satuan kerja seperti:
 - a. Inovasi layanan keimigrasian yang dibuat oleh satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang seperti:
 - Pasir Kuarsa (Pelayanan Keimigrasian Prima Keluar Masuk Desa)
 - Lemper (Layanan Pengantaran Paspor)
 - Penagan (Pengambilan Paspor Gak Turun Kendaraan)
 - Lapordand (Layanan Paspor Nyaman Di Akhir Pekan)
 - Mendanau (Melayani antar Desa dan Pulau) dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan
 - b. Inovasi layanan keimigrasian yang dibuat oleh satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan seperti:
 - Simpor (Sistem Informasi pelacakan permohonan paspor)
 - Keramunting (Kertas Terjemahan Untuk Pemohon Asing)
 - Laskar pelangi (Layanan Satu Kamar Pengganti Paspor Hilang, Rusak, Duplikasi Terintegrasi)
 - Lengkuas (Lobi Bebas Benturan Kepentingan)
 - Manggar (Media Keimigrasian Melalui Radio)



- Bujang Datang Informasi
- Berlayar (Barcode Informasi Layanan Paspor)
- Gangan (Greeting and Announcement for Good Information)

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 63 responden. Responden survei pada melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 28 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung dan Kantor Imigrasi. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.



Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

Tabel 3. 110 Nilai IPK Kanwil Bangka Belitung Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,85
2	Penyidikan	10	3,61
3	TAK	10	3,79
4	Pengawasan	20	4,85
5	Pengaduan	20	3,86
6	Pencegahan	20	3,79

Tabel 3. 111 Nilai IPK Kanwil Bangka Belitung Unsur Survei Pihak Eksternal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,67
2	Penyidikan dan TAK	20	3,61
3	Pengawasan	20	3,79
4	Pengaduan	20	3,63
5	Pencegahan	20	3,69

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 63 yang terdiri dari 35 orang responden internal dari divisi keimigrasian dan kantor imigrasi serta 28 orang responden eksternal dari divisi keimigrasian dan kantor imigrasi dengan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah sebesar 3,81 untuk internal dan 3,68 untuk eksternal sehingga untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(3,81 \times 35) + (3,68 \times 28)}{35 + 28} \\
 &= \frac{[133,35 + 103,04]}{[63]} \\
 &= 3,75
 \end{aligned}$$



Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung sebesar 3,75. Nilai tersebut telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 119%.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$
$$= \frac{3,75}{3,13} \times 100\% = 119\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung pada tahun 2023, telah tercapai.

Tabel 3. 112 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	3.75	119%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,85 dan 2021 sebesar 3,91 realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini diketahui bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung masih belum stabil dan perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya. Dibandingkan dengan tahun 2022 dimana nilai Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 3,85 pada tahun 2023 capaian IPK sebesar 3,75 atau turun sebesar 0.10. Hal ini kemungkinan besar antara lain:

1. Survei IPK tahun 2023 tidak hanya diikuti pejabat struktural di satuan kerja, tetapi juga melibatkan responden pihak eksternal yaitu, Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
2. Privasi responden lebih terjaga. Hal ini dikarenakan responden tidak perlu mengisi data identitas sebagaimana dimana responden harus login dan mengisi data diri seperti Nama, NIP, Email dan seterusnya. Dengan demikian, responden dapat mengisi survei dengan lebih leluasa dan sesuai dengan kondisi riil.



3. Penambahan responden dari tahun 2022 sebanyak 51 responden dan di tahun 2023 bertambah menjadi 63 responden. Hal ini menyebabkan semakin banyak responden maka semakin dinamis nilai yang diberikan oleh responden.

Tabel 3. 113 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK II

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,91	125%	3,12	3,85	123%	3,13	3,75	119%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,75 indeks atau nilai capaian sebesar 119%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,75}{3,14} \times 100\% = 119\%$$

Tabel 3. 114 Target Jangka Menengah SK XI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14	3,75	119%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi , seperti:

1. Tindak administratif keimigrasian : 18 orang
2. Intelijen : 52 kegiatan
3. Pengawasan : 21 kegiatan
4. Pendataan : 6 kegiatan
5. Operasi Gabungan Timpora : 8 kegiatan
6. Rapat Timpora : 8 kegiatan

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur penyidikan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Jumlah orang asing di wilayah Bangka Belitung sedikit.
2. Sudah tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian kepada penjamin.
3. Pada kegiatan pendataan orang asing dilakukan pengumpulan informasi dari penjamin hal terkait kendala yang dihadapi ketika pengajuan perpanjangan izin tinggal ataupun alih status.



SASARAN KEGIATAN 12

Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah. Bahwa berdasarkan data penerimaan PNBP pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar Rp. 1.173.650.000,- sedangkan untuk Tahun 2022 penerimaan PNBP sebesar Rp. 1.492.600.000,- Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Kenaikan PNBP 2023}}{\text{Target Penerimaan PNBP 2023 (55.609.031 + Target PNBP 2022)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1.173.650.000}{1.169.490.656} \times 100 \%$$

$$\% = 1.003 \times 100\%$$

$$\% = 100.3 \%$$

Target PNBP Tahun 2022 adalah Rp. 1.113.800.625,-

Berdasarkan konversi dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase peningkatan Jumlah PNBP pada tahun 2023 telah tercapai 5.37% dari target kenaikan sebesar 5% pada tahun 2023 sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{5.37}{5} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 107 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 sebesar 107%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan



sebagai berikut:

Tabel 3. 115 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5.37%	107%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Presentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 5% sedangkan realisasinya adalah 5.37% sehingga capaian kinerjanya adalah 107%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2022 sebesar 12% dan pada tahun 2023 meningkat yaitu 5.37%.

Tabel 3. 116 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XII dan IKK I

INDIKATOR	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	12%	240%	5%	5.37%	107%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat penurunan realisasi dan capaian kinerja IKK dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Presentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2023 sebesar 5% sementara realisasi capaian tahun 2023 adalah 5.37% dengan capaian 107%.



Tabel 3. 117 Target Jangka Menengah SK XII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase peningkatan PNBP	5 %	5 %	5 %	5 %	5.37%	107 %

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{5.37}{5} \times 107 \%$$

$$\text{Capaian} = 107 \%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Telah dilakukan kerja sama dan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama untuk dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan peduli akan pentingnya legalitas usaha seperti pendaftaran Perseroan Terbatas, Badan Hukum serta layanan administrasi hukum lainnya. Mengoptimalkan pelayanan publik berbasis elektronik dengan layanan pengelolaan pengaduan ataupun konsultasi, sehingga masyarakat yang memiliki pertanyaan, keluhan, ataupun pengaduan terkait layanan AHU dapat direspon dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait layanan administrasi hukum umum di wilayah, informasi mengenai pentingnya legalitas dalam pendirian usaha serta pendirian badan hukum di wilayah dapat terus meningkat, sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



SASARAN KEGIATAN 13

**Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Tugas MKNW,
MPW dan MPD**

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Dugaan Pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Dugaan Pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi majelis dalam upaya pembinaan terhadap tugas dan fungsi Notaris. Bahwa berdasarkan data Tahun 2023 terdapat 5 pengaduan yang masuk kepada MPW dan 5 diantaranya yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\% = 1 \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase penyelesaian permohonan masyarakat sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{86} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK pada Tahun 2023 sebesar 116%,



sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 118 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	86%	100%	116%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 119 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	84%	100%	119%	86%	100%	116%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah tahun 2023 sebesar 86% sementara realisasi adalah 100% dengan capaian IKK 116%.



Tabel 3. 120 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	82%	84%	86%	88%	100%	116%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{86} \times 107 \%$$

$$\text{Capaian} = 107 \%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Membangun sinergitas atau komitmen antar pegawai dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah dalam hal ini Sub Bidang AHU. Serta melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris secara daring maupun secara tatap muka.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah. Sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap tugas dan jabatannya dapat dicegah.



SASARAN KEGIATAN 14

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data terdapat 111 permohonan layanan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah dengan target sebanyak 21 permohonan. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{111}{21} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 52.8 \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 528 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sebesar 528% yang dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 3. 121 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	21 layanan	111 layanan	528%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 21 permohonan sedangkan realisasinya adalah 111 permohonan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 sebesar 43 permohonan dan pada tahun 2023 telah tercapai 111 permohonan.

Tabel 3.122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	17 permohonan	43 permohonan	252%	21 layanan	111 layanan	528%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 21 permohonan sementara realisasi tahun 2023 adalah 111 permohonan dengan capaian 528%.



Tabel 3.123 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	15	15	15	15	111 permohonan	528%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{111}{15} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 740\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melakukan permohonan kekayaan intelektual dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon. Petugas Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang baik datang langsung ke Kantor Wilayah ataupun yang melalui *Call Center* mengenai tata cara pendaftaran mandiri secara online tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung memahami prosedur yang berlaku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran



kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah.”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dan promosi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data Kantor Wilayah telah menyelenggarakan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Promosi dan Diseminasi KIK di Kabupaten Bangka Selatan, 9 Maret 2023;
- 2) Sosialisasi Kekayaan Intelektual di SMA Negeri 1 Belinyu, 13 April 2023;
- 3) Sosialisasi Kekayaan Intelektual di SMA Negeri 1 Riau Silip, 14 April 2023
- 4) Sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Pemetaan Kawasan Karya Cipta, 15 Mei 2023;
- 5) Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bimtek Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten di Santika Hotel, 22 Mei 2023;
- 6) Pelaksanaan *Mobile Intellectual Property Clinic*, pada 5-7 Juli 2023;
- 7) Pelaksanaan kerja sama pemantauan/pengawasan di bidang kekayaan intelektual dengan instansi terkait di wilayah di Hotel BW Suite, 14 Agustus 2023;
- 8) Kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, 7 September 2023.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{8}{1} \times 100 \%$$

$$Capaian = 8 \times 100 \%$$



Capaian = 800 %

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah sebesar 800%.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 sebesar 800%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.124 Perbandingan Target dan Realisasi IKK SK XIV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	8 lokus	800%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1 lokus sedangkan realisasinya adalah 8 lokus sehingga capaian kerjanya adalah 800%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2022 sebanyak 4 lokus dan pada tahun 2023 tercapai 8 lokus.

Tabel 3.125 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK II

Indikator	2021			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	4 lokus	400%	1 lokus	8 lokus	800%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target kinerja untuk indikator jumlah



pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah pada tahun 2023 sebanyak 8 lokus.

Tabel 3.126 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	1 lokus	1 lokus	1 lokus	8 lokus	800%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{8}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 800\%$$

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan melalui rumus di atas, realisasi jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah berdasarkan target RPJMN mencapai 800%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Selain melalui kegiatan diseminasi dan promosi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dalam hal penyebaran informasi terkait layanan Kekayaan Intelektual yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih mempercepat penyebarluasan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kantor Wilayah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk



bersama-sama mengajak masyarakat serta pelaku usaha baik itu Usaha Kecil Mikro atau Industri Kecil Mikro sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual bagi masyarakat dan pelaku.

SASARAN KEGIATAN 15

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data terdapat 1 pengaduan mengenai pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk ke Kantor Wilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah aduan pelanggaran yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh aduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh persentase sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$



Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2023 diperoleh sebesar 100%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.127 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk ke Kantor Wilayah adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2022 adalah nihil sedang untuk tahun 2023 Kantor Wilayah telah menerima 1 pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Tabel 3.128 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100%	NIHIL	NIHIL	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah NIHIL, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 terdapat 1 pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, capaian pada tahun 2023 yaitu 1 pengaduan.



Tabel 3.129 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2023	2023	2024		
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 2 (dua) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah siap menindaklanjuti jika ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Hal lain yang mendukung yaitu adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset Kekayaan Intelektualnya, sehingga akan mengurangi pelanggaran yang ada.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 di Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Februari 2023;
- 2) Kerja sama pemantauan/pengawasan di bidang KI dengan instansi terkait di wilayah serta pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan di Belitung pada tanggal di BW Suite Hotel Tanjungpanda, 14 Agustus 2023;
- 3) Kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, 07 September 2023

Bahwa berdasarkan data Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 150\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2023 diperoleh sebesar 150%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat

Tabel 3.130 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	3 lokus	150%



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2022 terdapat 2 (dua) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Tabel 3.131 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 lokus	100%	2 lokus	3 lokus	150%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan target 2 (dua) lokus kegiatan, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 150% dengan target 2 lokus kegiatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah pada tahun 2023 yaitu 150%.

Tabel 3.132 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2023	2023	2024		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 lokus	2 lokus	2 lokus	2 lokus	3 lokus	150%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 150\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah bekerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan kegiatan kerja sama Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual di Hotel BW Suite Tanjungpandan Belitung dengan menyerahkan sertifikat pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual kepada galeri batik Sepiak Belitung.



Bahwa berdasarkan data tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan pelaksanaan pemantauan produk Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian tahun 2023 diperoleh sebesar 100%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.133 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	1 laporan	100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah tahun 2022 tercapai 1 (satu) laporan, sedangkan pada tahun 2023 tercapai 1 (satu) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi 1 (satu) laporan, sedangkan untuk capaian Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 1 laporan.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah pada tahun 2023 yaitu 100%.

Tabel 3.135 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	100 %				

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Koordinasi yang terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya



pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

SASARAN KEGIATAN 16

Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menghasilkan analisa melalui pemanfaatan aplikasi SIPKUMHAM dengan terlaksananya:

- 1) Peningkatan pelayanan Dukcapil Bangka Belitung;
- 2) Wujud Nyata Reklamasi Pasca Tambang di Desa Selinsing oleh PT. Timah Tbk;
- 3) Maraknya kasus narkoba di Bangka Selatan;
- 4) SE Gubernur tentang pembatasan distribusi jenis BBM bersubsidi tertentu.

Dengan demikian untuk memperoleh persentase Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan ham perlu dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang di berikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$



Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.136 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM tahun 2022 mencapai 125%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 125%.

Tabel 3.137 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80 %	100 %	125 %	80 %	100 %	125 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi 125%, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 125%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, capaian pada tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.138 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	70%	80%	80%	80%	100%	125%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 125%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM guna mendapatkan data yang akurat dalam pengolahan data.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Analisa Kebijakan yang sebelumnya telah menghasilkan suatu rekomendasi agar untuk tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah rekomendasi.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Hasil penelitian hukum dan ham yang disosialisasikan di wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Hasil penelitian hukum dan ham yang disosialisasikan di wilayah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan sosialisasi melalui Diskusi Obrolan Peneliti (Opini) dengan Tema “Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan Mental di Lapas” telah dilaksanakan pada Kamis, 2 Maret 2023 bertempat di Stasiun TVRI Bangka Belitung, Peserta yang mendaftar sebanyak 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) orang, peserta yang hadir melalui *zoom meeting* sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) orang, peserta yang mengisi daftar hadir 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) orang, peserta yang hadir di studio TVRI sebanyak 40 orang (Tim Kanwil dan TVRI), dan di relay melalui Live Youtube yang ditonton oleh kurang lebih 300 (tiga ratus) orang pada link <https://www.youtube.com/live/SpZ9FfG0op>.

	Target	Realisasi
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku
		Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan Mental di Lapas

Berdasarkan data tersebut, capaian IKK Tahun 2023 dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 100%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.139 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK II



Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah tahun 2022 mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi 1 buku, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 1 buku.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target tahun 2023 sudah terlampaui dengan realisasi 100%.

Tabel 3.141 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$



$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan sosialisasi hasil penelitian hukum dan ham yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dukungan dari berbagai stakeholder terutama unit Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dalam rangka menyukseskan kegiatan sosialisasi.

SASARAN KEGIATAN 17

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah

Sasaran kegiatan di atas dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mengemban tugas dan fungsi tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang digunakan yaitu Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.



Berdasarkan jumlah permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda/Raperkada dan permohonan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda yang masuk ke Kantor Wilayah sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 51 (lima puluh satu) dan 106 Raperkada. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Perancangan Raperda/Raperkada}}{\text{Jumlah Permohonan yang difasilitasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{161}{161} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Tabel 3.142 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 125% dan pada



tahun 2023 sebesar 125%.

Tabel 3.143 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVII dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tidak ada penurunan maupun kenaikan antara capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator persentase rancangan Raperda/Raperkada yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah pada tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.144 Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	80%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase rancangan Raperda/Raperkada yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Terjalinnnya sinergi dan kerja sama yang meningkat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, dukungan regulasi yang memang memerintahkan langsung bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan meningkatnya permohonan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tentunya Kantor Wilayah juga harus didukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, sehingga melalui program bimbingan teknis bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, SDM pada Kantor Wilayah dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya.

SASARAN KEGIATAN 18

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Sasaran kegiatan di atas dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga tenaga perancang perundang-undangan perlu mendapatkan pembinaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah hukum. Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang



mendapatkan pembinaan. Pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{50}{16} \times 100 \%$$

$$Capaian = 312\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.145 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	50 orang	312 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tahun 2023 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 16 orang sedangkan realisasinya adalah 50 orang sehingga IKK Tahun 2023 adalah 312%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan tahun 2023 sebesar 312% (50 orang) dan pada tahun 2022 yaitu 187% (30 orang).

Tabel 3. 146 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XVIII dan IKK I

INDIKATOR	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan Pembinaan	16 orang	30 orang	187%	16 orang	50 orang	312%



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut terjadi peningkatan capaian kinerja IKK tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 dan 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2022 sebanyak 16 orang dan tahun 2023 sebanyak 16 orang, sementara realisasi capaian pada tahun anggaran 2022 adalah 187% dan tahun 2023 adalah 312%.

Tabel 3. 147 Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	50 orang	312%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{50}{16} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 312\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Bahwa kesadaran akan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud. Kemudian sikap



kooperatif yang dimiliki oleh seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan sosialisasi serta seminar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui *daring*, para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di daerah dapat ikut andil dalam peningkatan kapasitas diri serta pengetahuan mengingat begitu dinamisnya perkembangan hukum yang ada di masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 19

Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum daerah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan koordinasi rangka fasilitasi program pembentukan peraturan hukum daerah ke 7 Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dalam penyusunan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) yang dilaksanakan pada Rabu, (01/02/2023) di Ruang Rapat Bupati



Kabupaten Belitung Timur. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah mengundang Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- 3) FGD Tim Kelompok Kerja Analisa dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023.

Dengan demikian untuk memperoleh persentase jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capain} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 150\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sampai dengan tahun 2023 sebesar 150%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.148 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM tahun 2022 mencapai 150% dan pada tahun 2023 mencapai 150%.



Tabel 3.149 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150%	2 kegiatan	3 kegiatan	150%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 150% dengan realisasi 3 kegiatan, dan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 150% dengan realisasi 3 kegiatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 150% dengan realisasi 3 kegiatan.

Tabel 3.150 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	150%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 150\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 150% dengan realisasi 3 kegiatan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah hanya dilakukan oleh Kementerian



Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, Program Pembentukan Peraturan Daerah serta Analisis dan Evaluasi Hukum di wilayah;
- b. Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan JF Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana Fasilitasi Naskah Akademik, Analisa dan Evaluasi Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pedoman analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN 20

Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 8 (delapan) OBH untuk memberikan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- 1) PDKP Babel;
- 2) Hatami Koniah;
- 3) LPH dan HAM Pancasila;



- 4) LBH Al-Hakim Babel;
- 5) LBH KUBI;
- 6) Milenial Bangka Tengah Keadilan (MBK);
- 7) LKBH Belitung;
- 8) LBH Lentera Serumpun Sebalai;

Sampai dengan Desember terdapat 201 permohonan bantuan hukum litigasi dan yang telah diproses sebanyak 190 permohonan.

Dengan demikian untuk memperoleh persentase capaian kinerja IKK Tahun 2023 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan litigasi}}{\text{Seluruh permohonan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{190}{201} \times 100\%$$

$$\% = 94\%$$

Berdasarkan hasil persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94}{82} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 114\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 114%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.151 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	94%	114%



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2022 mencapai 103%, sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 114%.

Tabel 3.152 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	84%	103%	82%	94%	114%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas realisasi kinerja IKK tahun 2022 adalah 84% dengan capaian 103%, sedangkan untuk realisasi IKK sampai Tahun 2023 sebesar 94% dengan realisasi 114%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, realisasi pada tahun 2023 sebesar 94% dengan capaian 116%.

Tabel 3.153 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	94%	116%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94}{81} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116\%$$



Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 116%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng OBH untuk menyebarkan pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Presentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 6 (enam) OBH untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam bentuk :

- 1) Investigasi Kasus;
- 2) Konsultasi Hukum;
- 3) Mediasi;
- 4) Negosiasi;



- 5) Pendampingan di luar Pengadilan; dan
- 6) Penyuluhan Hukum;

Terdapat total 26 permohonan layanan Bantuan Non-Litigasi yang telah dilaksanakan oleh OBH dimana sesuai dengan pedoman yang ada. Khusus untuk Bantuan Non-Litigasi terdapat penyesuaian besaran anggaran yang diberikan untuk mengakomodir kegiatan agar lebih maksimal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi.

Dengan demikian untuk memperoleh persentase capaian kinerja IKK Tahun 2023 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan non litigasi}}{\text{Seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 125%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.154 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase



permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2022 mencapai 125%, sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 125%.

Tabel 3.155 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK II

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas realisasi kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 125%, sedangkan untuk realisasi IKK Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 125%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 125% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.156 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%	100%	125%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 125%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat



kegiatan pengukuran Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng OBH untuk menyebarluaskan pelaksanaan bantuan hukum gratis baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Indeks kepuasan layanan bantuan hukum”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu indeks layanan kepuasan bantuan hukum. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pelaksanaan Bantuan Hukum telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh para PBH baik pada perkara perdata maupun pidana. Pada klien masyarakat perkara perdata, Tim Panwasda melakukan wawancara dan pengisian kuesioner langsung ke alamat yang bersangkutan. Adapun untuk klien masyarakat perkara Pidana, Tim Panwasda melaksanakan wawancara dan pengisian kuesioner ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan. Kuisisioner yang telah diisi oleh penerima bantuan hukum tersebut kemudian di input kembali oleh operator SIDBANKUM ke dalam aplikasi dengan tautan <https://sidbankum.bphn.go.id/>. kemudian diperoleh hasil indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan rata-rata 77.25.



Berdasarkan hasil persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{77.25}{76.75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,7\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 101%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 157 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75	77.25	101 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2022 mencapai 104%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 101%.

Tabel 3.158 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XX dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	80	104%	76.75	77.25	101%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 104% dengan realisasi 80, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 101% dengan realisasi 77.25.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 101% dengan realisasi 77.25.



Tabel 3.159 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	76.61	76.61	76.61	77.25	101%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{77.25}{76.61} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 101%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kepuasan layanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum secara berkelanjutan dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum dengan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga potensi pelanggaran serta penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum oleh OBH bisa diminimalisir.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pembinaan terhadap desa/kelurahan sadar hukum dan pada saat ini untuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu berjumlah 41 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari indikator tersebut dapat dihitung melalui:

$$\% = \frac{\text{Jumlah desa yang sudah sesuai dengan kriteria desa sadar hukum}}{\text{Jumlah usulan Kanwil}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{25}{32} \times 100\%$$

$$\% = 78\%$$

Berdasarkan hasil persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{78}{70} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 111%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.160 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	78%	111%



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2022 mencapai 142%. sedangkan pada tahun 2023 mencapai 111%.

Tabel 3.161 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK IV

INDIKATOR	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	142%	70%	78%	111%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 142% dengan realisasi 100%, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 111% dengan realisasi 78%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 142% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.162 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK IV

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%	78%	111%

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target RPJMN 2023} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{78}{70} \times 100\%$$

$$Capaian = 111\%$$



Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 111%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum di setiap desa/kelurahan binaan, semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga cita-cita hukum bisa tercapai melalui desa-desa.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain melalui kegiatan pembangunan hukum dalam pembentukan DSH seperti penyuluhan hukum dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang dilaksanakan secara rutin oleh JFT Penyuluh Hukum.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Presentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif. Anggota JDIH yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini yang telah terintegrasi berjumlah 17 (tujuh belas) dari 19 instansi. Diantaranya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Kota Pangkalpinang, DPRD Kab. Bangka, DPRD Kab. Bangka Tengah, DPRD Kab. Bangka Barat,



DPRD Kab. Bangka Selatan, DPRD Kab. Belitung, DPRD Kab. Belitung Timur, dan semua anggota sudah terintegrasi 100% dengan website JDIHN Pusat.

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari indikator tersebut dapat dihitung melalui:

$$\% = \frac{\text{Jumlah anggota yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh anggota JDIHN}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{17}{19} \times 100\%$$

$$\% = 89\%$$

Berdasarkan hasil persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{89}{20} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 445\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 445%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.163 Perbandingan Target dan Realisasi SK XX dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	89%	445%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif tahun 2022 mencapai 421.05%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 445%.

Tabel 3.164 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK V

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	84%	421.05%	20%	89%	445%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah



421.05% dengan realisasi 84%, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 445% dengan realisasi 89%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 445% dengan realisasi 89%.

Tabel 3.165 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK V

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	20%	20%	89%	445%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{89}{20} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 445\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMN Kantor Wilayah sebesar 445%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung sebagai pusat JDIHN di daerah;
- Keberadaan SDM yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH masing-masing wilayah.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIH di daerah. Tujuannya adalah dilakukannya konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIH.

SASARAN KEGIATAN 21

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa berdasarkan pemantauan pada aplikasi laporan capaian, Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan *upload* ke dalam situs serambi.ksp.go.id. sebanyak 8 (delapan) instansi pemerintah dengan rincian Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{8}{4} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 200\%$$



Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2023 sebesar 200%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.166 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	200%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM tahun 2022 terdapat 8 (delapan) instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) instansi pemerintah.

Tabel 3.167 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK I

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 instansi	8 instansi	400%	4 instansi	8 instansi	200%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 400% dengan realisasi 8 instansi pemerintah, sedangkan untuk capaian IKK sampai Tahun 2023 sebesar 400% dengan realisasi 8 instansi pemerintah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 160% dengan realisasi 8 instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM.



Tabel 3.168 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	8 instansi pemerintah	160%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{8}{5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 160\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM guna tetap mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian aksi HAM dalam hal ini Kantor Wilayah juga selalu melakukan komunikasi melalui surat notifikasi guna mengingatkan tenggang waktu pengumpulan data dukung terkait capaian aksi HAM dan melaksanakan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya terkait pelaksanaan program aksi HAM oleh masing-masing instansi pemerintah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.



❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01 tahun 2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023. Instansi pemerintah yang mendapat predikat Kabupaten/Kota peduli HAM adalah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{7}{3} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 233\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 200%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.169 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	233 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, capaian kinerja IKK tahun 2022 sebesar 200% dengan realisasi 2 instansi pemerintah sedangkan tahun 2023 capaian kinerja IKK sebesar 233% dengan realisasi 7 instansi.

Tabel 3.170 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK XXI dan IKK II

INDIKATOR	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 instansi	2 instansi	200%	3 instansi	7 instansi	233%



Berdasarkan hasil perhitungan di atas untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 233% dengan realisasi 7 instansi pemerintah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 700% dengan realisasi 7 instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM.

Tabel 3.171 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Kabupaten Kota Peduli HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	7 instansi	700 %

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{7}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 700\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemenuhan formula indikator kabupaten/kota peduli HAM serta terkait keabsahan seluruh data dukung yang digunakan selama proses penilaian kabupaten/kota peduli HAM; serta kesadaran masing-masing pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan perlindungan HAM sehingga dapat memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 Tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah;
- 2) Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang;
- 3) Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan;
- 4) Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.172 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXI dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	4 Instansi	400%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Instansi Pemerintah menindaklanjuti Diseminasi HAM}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{4}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 400\%$$



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, bahwa pelaksanaan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2022 ditiadakan, sedangkan sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan penilaian pelayanan publik berbasis HAM mencapai 4 (empat) instansi pemerintah.

Tabel 3.173 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	-	-	1 instansi	4 instansi	400%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Bahwa pelaksanaan penilaian pelayanan publik berbasis HAM sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 4 (empat) instansi pemerintah yang telah menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM, maka perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMN dapat didiskripsikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.174 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	4 instansi	400%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah selaku instansi pembina di wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tetap melakukan sosialisasi mengenai klasifikasi jenis data dukung yang ada nantinya menjadi maksimal. Melaksanakan rapat evaluasi guna mengetahui kekurangan yang menyebabkan gagalnya UPT dalam memperoleh predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap UPT yang ada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan indikator pelayanan publik berbasis HAM terpenuhi dengan baik.

SASARAN KEGIATAN 22

Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah melalui Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima 3 (tiga) pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengaduan terkait perusahaan yaitu Masih ada kewajiban yang belum terselesaikan oleh debitur yaitu denda keterlambatan pembayaran angsuran, kuasa hukum tidak dapat melihat rincian denda yang harus dibayar debitur(sudah diberikan rekomendasi);



- 2) Pengaduan gangguan kebisingan di Ling perumahan (pelapor tidak dapat melengkapi berkas pengaduan setelah pemberitahuan resmi secara tertulis oleh Kanwil, sehingga pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- 3) Pengaduan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karyawan oleh Perusahaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dianggap dilakukan secara sepihak.

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capain} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{3} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2023 sebesar 100%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.175 Perbandingan Target dan Realisasi SK XXII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah tahun 2022 mencapai 3 (tiga) rekomendasi, dan pada tahun 2023 mencapai 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah.

Tabel 3. 176 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXII dan IKK III

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%



Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi 3 rekomendasi, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 3 rekomendasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 3 (tiga) rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah.

Tabel 3.177 Target Jangka Menengah SK XXII dan IKK III

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	100%				

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kecepatan dan ketepatan Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui aplikasi SIMASHAM, sehingga pengaduan segera dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang telah membentuk PDP



HAM di setiap Kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terhadap para operator PDP HAM yang ada di kecamatan-kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.178 Pagu dan Realisasi Anggaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis
(Per 31 Desember 2023)

NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	KANTOR WILAYAH			
	KANWIL (SETJEN)	Rp 18.758.766.000	Rp 18.704.112.438	99.71%
	KANWIL (AHU)	Rp 2.330.716.000	Rp 2.330.211.292	99.98%
	KANWIL (PAS)	Rp 540.527.000	Rp 540.495.257	99.99%
	KANWIL (IMIGRASI)	Rp 1.320.128.000	Rp 1.320.107.900	100%
	KANWIL (KI)	Rp 1.330.618.000	Rp 1.330.253.120	99.97%
	KANWIL (PP)	Rp 209.570.000	Rp 209.559.600	100%
	KANWIL (DITJEN HAM)	Rp 243.997.000	Rp 243.714.470	99.88%
	KANWIL (BPHN)	Rp 1.192.593.000	Rp 1.191.448.230	99.90%
	KANWIL (BSK)	Rp 279.214.000	Rp 279.206.885	100%
2	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 11.339.241.000	Rp 11.044.931.185	97.40%
3	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Rp 9.097.595.000	Rp 9.045.199.838	99.42%



NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
4	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Rp 7.258.374.000	Rp 7.171.552.570	98.80%
5	Lapas Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang	Rp 13.663.703.000	Rp 13.450.650.721	98.44%
6	Bapas Kelas II Pangkalpinang	Rp 4.100.832.000	Rp 4.100.017.041	99.98%
7	Rupbasan Kelas II Pangkalpinang	Rp 2.130.220.000	Rp 2.104.230.350	98.78%
8	Rutan Kelas IIB Muntok	Rp 5.289.330.000	Rp 5.286.211.896	99.94%
9	Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang	Rp 10.658.960.000	Rp 10.643.549.564	99.86%
10	Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan	Rp 9.092.592.000	Rp 8.871.281.776	97.57%
11	LPP Kelas III Pangkalpinang	Rp 5.560.681.000	Rp 5.525.691.288	99.37%
12	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Rp 5.069.030.000	Rp 5.021.756.758	99.07%
TOTAL		Rp 109.466.687.000	Rp 108.414.182.179	99.04%

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 108.414.182.179 dengan persentase 99,04% dari pagu anggaran sebesar Rp 109.466.687.000.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. APLIKASI SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari :

1. Capaian keluaran, dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran, dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi, dengan bobot 18,2%;
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (deviasi RPD awal dan akhir), dengan bobot 9.7%.

Tabel 3.179 Nilai SMART DJA
di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung



LKjIP TAHUN 2023
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SATUAN KERJA	NILAI KINERJA					NILAI SMART
		Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	
1	KANTOR WILAYAH						
	SETJEN	99.71	99.79	100	16.86	92.15	97.69
	DITJEN PAS	99.99	99.98	100	20	100	100
	DITJEN IMIGRASI	100	99.99	100	20	100	100
	DITJEN AHU	99.98	99.98	100	20	100	99.99
	DITJEN KI	99.97	100	100	20	100	100
	DITJEN PP	100	100	100	20	100	100
	DITJEN HAM	99.88	99.88	100	20	100	99.97
	BPHN	99.9	99.99	100	20	100	99.99
	BSK	100	100	100	20	100	100
2	LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG	97.4	99.5	100	20	100	99.66
3	LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT	99.42	99.87	100	20	100	99.92
4	LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN	98.8	99.61	100	19.86	99.64	99.71
5	LAPAS KELAS III NARKOTIKA PANGKALPINANG	98.44	99.73	100	16.7	91.75	97.44
6	BAPAS KELAS II PANGKALPINANG	99.98	99.97	100	19.77	99.41	99.82
7	RUPBASAN KELAS II PANGKALPINANG	98.78	99.81	100	20	100	99.85
8	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	99.94	99.94	100	20	100	99.98
9	KANIM KELAS I TPI PANGKALPINANG	99.86	99.63	100	17.01	92.53	97.78
10	KANIM KELAS II TPI TANJUNGPANDAN	97.57	99.23	100	15.71	89.28	96.56
11	LPP KELAS III PANGKALPINANG	99.37	99.45	100	20	100	99.84
12	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	99.07	99.9	100	20	100	99.89
	NILAI SMART WILAYAH	99.4	99.81	100	19.3	98.24	99.4

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar **99.4**.

2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran,



efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Capaian Output.

Tabel 3.180 Nilai IKPA
di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung

NO	SATUAN KERJA	NILAI IKPA
1	KANWIL (SETJEN)	97.37
2	KANWIL (DITJEN PAS)	99.97
3	KANWIL (DITJEN IMIGRASI)	100
4	KANWIL (DITJEN AHU)	100
5	KANWIL (DITJEN KI)	100
6	KANWIL (DITJEN PP)	100
7	KANWIL (DITJEN HAM)	99.96
8	KANWIL (BPHN)	100
9	KANWIL (BSK)	100
10	LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG	95.75
11	LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT	98.16
12	LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN	98.84
13	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG	98.88
14	BAPAS PANGKALPINANG	99.19
15	RUPBASAN PANGKALPINANG	98.37
16	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	97.01
17	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	98.89
18	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	97.16



NO	SATUAN KERJA	NILAI IKPA
19	LPP KELAS III PANGKALPINANG	99.65
20	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	98.54
NILAI IKPA WILAYAH		98.89

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai IKPA Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar **98,89**.

Capaian Kinerja Anggaran dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot nilai 60% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Perhitungan capaian kinerja anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{60}{100} \times 99,4\right) + \left(\frac{40}{100} \times 98,89\right)$$

$$59,64 + 39,57 = 99,21$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar **99,21**.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET		REALISASI		CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(%)			
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)				URAIAN		
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitas Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks Kepuasan Sipemati Internal di lingkungan Kantor Wilayah			S.1 Indeks Triwulan IV	TW1	9.3	Indeks	11.3	125	Januari: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Februari: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Maret: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham		0	0
			Sesuai Kinerja Pegawai:				TW2	9.3	Indeks	11.6	125	April: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Mei: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Juni: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham			
							TW3	9.3	Indeks	11.6	125	Juli: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Agustus: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham September: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham			
							TW4	9.3	Indeks	11.7	126	Oktober: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham November: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham Desember: Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Balitbangkumham			



2. TARGET KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 39 Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Divisi Administrasi memiliki 10 Target Kinerja;
- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 17 Target Kinerja;
- Kepala Divisi Pemasarakatan memiliki 9 Target Kinerja; dan
- Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 3 Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan *Action Plan* Target Kinerja mulai B03 hingga B12 tahun 2023 dengan capaian nilai sebagai berikut:

Tabel 3.181 Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2023

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	100	100	100	100
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100
3	Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	100	100	100	100
4	Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat	100	100	100	100
5	Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah	100	100	100	100
6	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	100	100	100	100
7	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	100	100	100	100
8	Optimalisasi implementasi <i>Corporate University</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	100	100	100	100
9	Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	100	100	100	100
10	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	100	100	100	100



Tabel 3.182 Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2023

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100
2	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	100	100	100	100
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	100	100	100	100
4	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	100
5	Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	100	100	100	100
6	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	100	100	100	100
7	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	100	100	100	100
8	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	100	100	100	100
9	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	100	100	100	100
10	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	100	100	100	100
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	100	100	100	100
12	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	100	100	100	100
13	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi	100	100	100	100



No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
	paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang				
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	100	100	100	100
15	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100
16	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100
17	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100

Tabel 3. 183 Capain Target Kinerja Divisi Pemasarakatan Tahun 2023

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	100	100	100	100
2	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakat Di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pamasarakatan di bidang pengelolaan basan baran	100	100	100	100
4	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pamasarakatan	100	100	100	100
5	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pamasarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	100	100	100	100
6	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	100	100	100	100
7	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	100	100	100	100
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pamasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	100	100	100	100
9	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	100	100	100



Tabel 3. 184 Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2023

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	100	100	100	100
2	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di Wilayah Indonesia	100	100	100	100
3	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan capaian Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

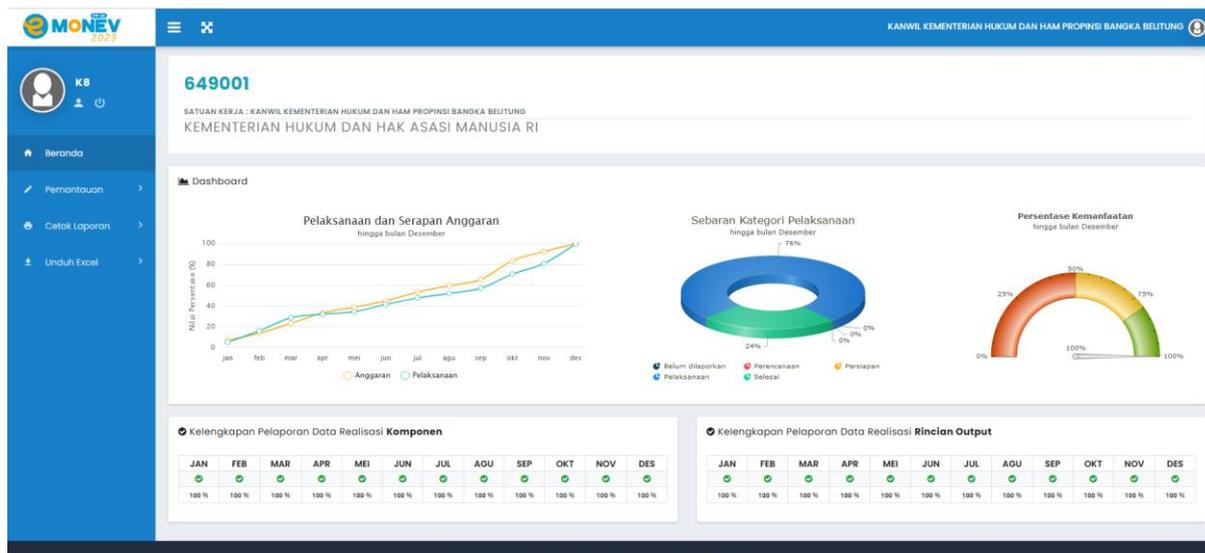
Tabel 3.185 Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022 dan 2023

No	Kepala Kantor Wilayah/Divisi	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Kepala Kantor Wilayah	100%	100%
2	Kepala Divisi Adminsitrasi	100%	100%
3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	100%	100%
4	Kepala Divisi Pemasarakatan	99,54%	100%
5	Kepala Divisi Keimigrasian	100%	100%

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).





Tabel 3.186 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	PELAPORAN DATA											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	SETJEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	DITJEN PAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DITJEN IMIGRASI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	DITJEN AHU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	DITJEN KI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	DITJEN PP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	DITJEN HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	BPHN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	BSK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nilai e-Monev BAPPENAS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada periode Januari sampai Desember 2023 sebesar 100.

4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2023 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH memangku salah satu program prioritas nasional yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu. Realisasi pemberian bantuan hukum oleh Kantor Wilayah sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:



- a. Permohonan bantuan Hukum Litigasi sebanyak 190 permohonan yang sudah dilayani dari 201 permohonan yang diterima; dan
- b. Permohonan bantuan Hukum Non Litigasi sebanyak 26 permohonan yang sudah dilayani dari 26 permohonan yang diterima.

E. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentunya dibutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sarana prasarana. Dalam penggunaan sumber daya tersebut, tentunya harus bersifat efektif dan efisien tanpa mengurangi output dan outcome yang dihasilkan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung sebagai penggerak utama program dan kegiatan yang memiliki berbagai potensi dan kompetensi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah pegawai sebanyak 115 orang yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 4 orang, Eselon III sebanyak 9 orang, Eselon IV sebanyak 18 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 35 orang, dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 48 orang.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya melalui formal maupun non formal. Upaya formal dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Adapun pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Sementara pada upaya non formal untuk meningkatkan kompetensinya dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kompetensi pekerjaannya.



2. Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung memiliki 9 DIPA pada tingkat Kantor Wilayah dan 11 DIPA pada tingkat satuan kerja. Dalam pelaksanaan anggaran selama satu tahun pada periode 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan revisi DIPA dalam rangka antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja.

3. Sarana Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat pengolah data (komputer, laptop, printer, LCD, scanner), fasilitas perkantoran (mesin penghancur kertas), ATK, maupun sarana prasarana pendukung lainnya.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten, disiplin dan berkualitas. Indikator dalam keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, dapat dilihat pada pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang ada pada DIPA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp108.414.182.179 atau 99,04% dari total pagu sebesar Rp 109.466.687.000. Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) bahwa efisiensi mencapai 19.3 dari skala 20. Hal ini dapat diartikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai efisien dalam mencapai kinerjanya.

Disamping itu, dalam menunjang pencapaian output kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan untuk penggunaan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal baik untuk peralatan pengolah data (komputer, laptop, printer, scanner, LCD, dll) maupun peralatan fasilitas perkantoran lainnya (mesin penghancur kertas). Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pemakaian, maka dilakukan pemeliharaan mesin/peralatan secara berkala untuk memaksimalkan fungsi dari mesin/peralatan tersebut.



BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2023 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **99,21**.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada setiap Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

A. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 123%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2023 dengan DIPA **Rp 18.758.766.000,-** sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan sebesar **Rp 18.704.112.438,-** atau dipersentasekan **99,71%**.

B. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dari uraian LKjIP Tahun 2023 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023;
2. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, dengan catatan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga *output* dan *outcome* yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;



3. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2024 mendatang;
4. Realisasi anggaran tahun 2023 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BSK dan BPHN adalah **99.96% per tanggal 31 Desember 2023.**

C. Divisi Keimigrasian

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122%
 - b. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 119%
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp1.320.107.900 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp1.320.128.000;
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja adalah munculnya kegiatan diluar perencanaan mandatori pusat sehingga Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung harus menyusun kembali rencana kegiatan penyesuaian setiap triwulan.

D. Divisi Pemasarakatan

Dari uraian capaian kinerja Divisi Pemasarakatan pada Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pemasarakatan selama tahun 2023 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik.
2. Secara umum realisasi kinerja Divisi Pemasarakatan pada Tahun 2023 sebesar 100%.
3. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan belum mencapai target yang ditentukan yaitu:



- a. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan per bulan Juni tahun 2023 untuk program asimilasi rumah telah ditiadakan sehingga mengurangi data dalam perbandingan penghitungan bagi narapidana yang termasuk dalam syarat hak-hak integrasi;
- b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Pendidikan belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa Lapas yang belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan Kejar Paket A, B, dan C;
- c. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikasi belum mencapai target dikarenakan keterbatasannya tenaga pengajar yang bekerja sama dengan pihak Lapas/Rutan/Anak, sehingga kurangnya minat WBP untuk melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang bersertifikat;
- d. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum;
- e. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) belum mencapai target dikarenakan per bulan November tahun 2023 telah dilakukan Kegiatan ACF TBC Melalui Skrining Gejala dan Intervensi Chest X-ray (Mobile Rontgen) kepada 206.330 Tahanan/Narapidana/Anak di 374 UPT Pemasarakatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023. Sehingga terdeteksi jumlah narapidana lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang positif TB jadi untuk narapidana yang berhasil sembuh belum ada karena belum habis masa pengobatannya sampai dengan akhir tahun 2023.
- d. Kinerja keuangan Divisi Pemasarakatan pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasarakatan dalam APBN Divisi Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 540.527.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 540.495.257,- atau sebesar 99,99%.



2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan juga Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Administrasi pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pemasarakatan pada tahun berikutnya disarankan untuk:
 - a. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Divisi Pemasarakatan khususnya yang berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah harus senantiasa melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian sehingga target-target yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat terpenuhi dalam tahun berjalan; dan
 - b. Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan yang belum tercapai pada tahun 2023 akan dipenuhi pada tahun berikutnya tentunya dengan melihat kekurangan kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Keimigrasian pada tahun berikutnya disarankan untuk:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati;
 - b. Menyusun rencana kerja, target capaian realisasi anggaran yang terangkum dalam rencana penarikan dana; dan
 - c. Rapat evaluasi kegiatan dan kinerja anggaran berdasarkan disbursement plan sebagai kontrol akuntabilitas kinerja anggaran.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada



tahun berikutnya disarankan untuk:

- a. Peningkatan sinergitas antar pihak, terutama internal dan eksternal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta penguatan di semua level kegiatan dan program pada tahun anggaran 2024;
- b. Penguatan komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut dari program nasional yaitu penguatan sumber daya manusia;
- c. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing- masing bidang, dengan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berbasis *output dan outcome*.

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PR.01.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2024 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2023.



LAMPIRAN



A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.945.870.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 14.945.870.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

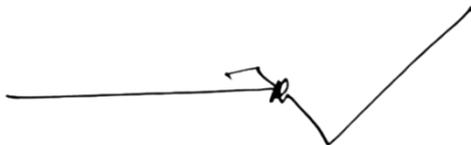
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pamasarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pamasarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

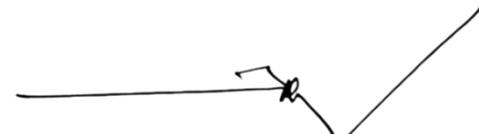
Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 24.631.531.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 46.317.997.000

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

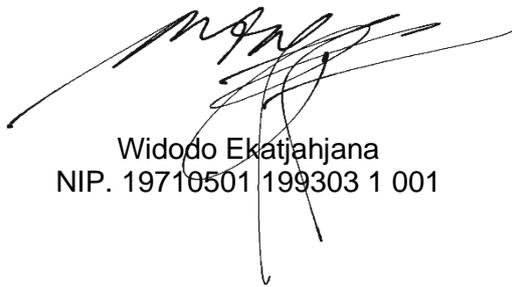
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.361.285.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.361.285.000,-

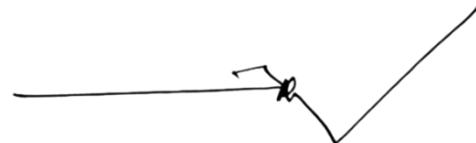
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.330.716.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.330.716.000,-

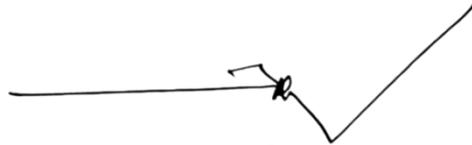
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	21 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.330.618.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.330.618.000,-

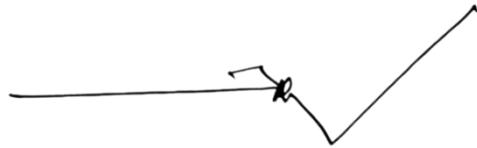
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 209,570,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 209,570,000 ,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto

NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

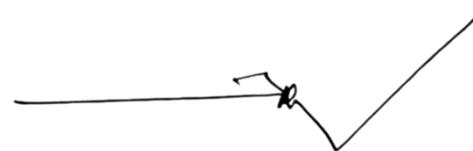
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 243,997,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 243,997,000

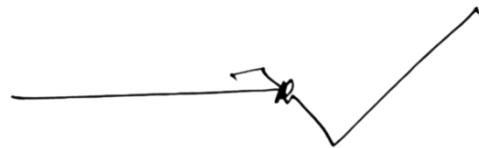
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

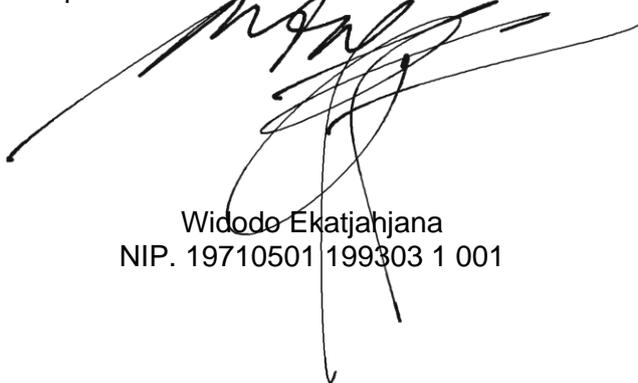
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

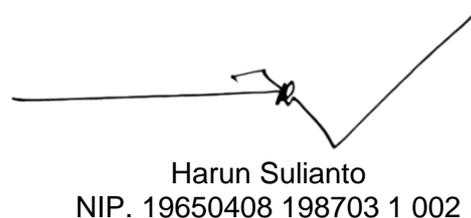
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 144.967.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 144.967.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 975.298.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 975.298.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Widodo Ekatihjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

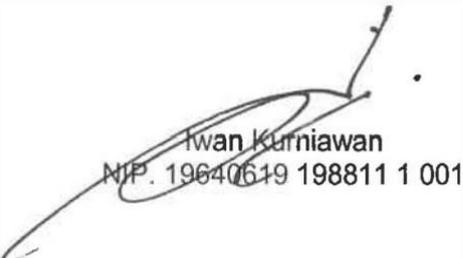
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

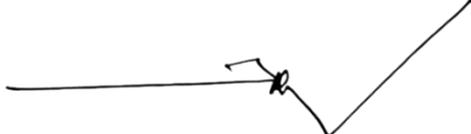
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

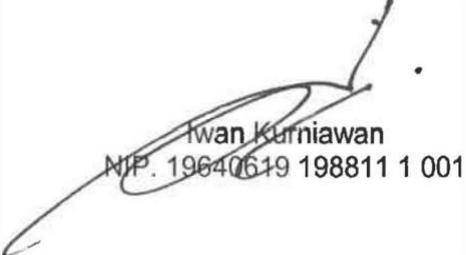
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 279.214.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 279.214.000,-

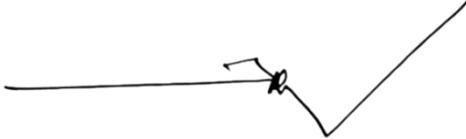
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP. 19650408 198703 1 002

B. PENGHARGAAN TAHUN 2023

1. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 99.3 Kategori Pagu DIPA di atas 10 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649001);



2. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649003);



3. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649002);



4. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 200 Juta s.d. 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649008);



5. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649006);



6. Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649005);



7. Peringkat Pertama Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester II Tahun 2022 (DIPA 649002);



8. Predikat Terbaik I atas Peningkatan Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual Oktober 2022-2023;



9. Terbaik I Penyusun Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari-Juli 2023;



10. Peringkat Kedua Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 99.99 Kategori Pagu DIPA di atas 100 juta s.d 2.5 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649009);



11. Terbaik Kedua Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung kategori UAPPA-W dengan jumlah UAKPA lebih dari 8 unit;



12. Peringkat Ketiga Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu DIPA Kecil Periode Semester I Tahun 2023 (DIPA 649002);



13. Peringkat Ketiga Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Kecil Periode Semester II Tahun 2022 (DIPA 649004);



14. Peringkat Ketiga Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu Besar Periode Semester II Tahun 2022 (DIPA 649001);



15. Penghargaan Atas Kategori Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat Wilayah TA 2023;



16. Penghargaan Atas Pelaporan Harta Kekayaan ASN Tercepat, Persentase Pengunggahan BPE SPT, dan Terverifikasi Lengkap;



17. Penghargaan Atas Partisipasinya Dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Penginputan Pemenuhan Data Dukung Rencana Aksi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;



18. Penghargaan Atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Sepanjang Tahun 2023;



19. Penghargaan Atas Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023;



20. Penghargaan Atas Mendorong Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi manusia Tahun 2022 dalam Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023;



21. Penghargaan Atas Komitmen dan Konsistensinya Dalam Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dari Kabupaten Belitang Timur;



